



**PENGARUH KEBIJAKAN SISTEM *OFFICE*
CHANNELING TERHADAP KINERJA PERBANKAN
SYARIAH**

SKRIPSI

**untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Riana Afiati Mufidah

3351405080

**PERPUSTAKAAN
UNNES**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2009

REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, dosen pembimbing skripsi dari mahasiswa :

Nama : Riana Afiati Mufidah

NIM : 3351405080

Jurusan/Prodi : Akuntansi/Akuntansi S1

Judul Skripsi : **PENGARUH KEBIJAKAN SISTEM OFFICE CHANNELING TERHADAP KINERJA PERBANKAN SYARIAH**

Menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan bimbingan skripsi dan siap untuk diajukan pada sidang ujian skripsi.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 7 Agustus 2009

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Drs. Heri Yanto, MBA
NIP. 131658238

Nanik Sri Utaminingsih, SE. M.Si
NIP. 132320167

PERPUSTAKAAN
UNNES

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Amir Mahmud, S.Pd. M.Si
NIP. 132205396

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian

Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 7 Agustus 2009

Dosen Pembimbing I

Drs. Heri Yanto, MBA
NIP. 131658238

Dosen Pembimbing II

Nanik Sri Utaminingsih, SE. M.Si
NIP. 132320167

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

PERPUSTAKAAN

UNNES

Amir Mahmud, S.Pd. M.Si
NIP. 132205396

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 29 Agustus 2009



Drs. Agus Wahyudin, M.Si
NIP. 131658236

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 7 Agustus 2009

Riana Afiati Mufidah
3351405080



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

”Bila akal berbicara kepadamu, dengarkanlah apa yang dia katakan, dan kamu akan selamat. Karena Tuhan tidak memberikan kepadamu pembimbing yang lebih baik dari pada akal. Namun akal sendiri tidak akan berdaya tanpa pertolongan pengetahuan. Tanpa pengetahuan, akal akan menjadi seperti orang miskin yang tak memiliki rumah, dan pengetahuan tanpa akal seperti rumah yang tidak dirawat”

(Kahlil Gibran)

Kupersembahkan karya ini untuk :

- *Bapak Muhammad Djufri dan Ibu Siti Rodhiyah*
untuk segala cinta dan doa
- *Mas Ahmad Basri Setianto dan Mbak Amin Rokhayati, Mbak Ummu Atiyah Dyah Utami dan Mas Muhammad Fana Aditya serta Mbak Fitri Nugrahaini dan Mas Indrojati Hernowo Edi*
untuk kasih sayang yang tak tergantikan
- *Tsaqif Mudhofar Al-Djufri, Umi Rumaisha Al-Djufri, Askar Roshif Ibrahim, Razan Nashif Jazary dan Ullayya Zada Alejandro*
untuk canda dan tawa pelipur laraku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur senantiasa Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan judul “Pengaruh Kebijakan Sistem *Office Channeling* Terhadap Kinerja Perbankan Syariah”.

Karya ini disusun sebagai tugas akhir yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang.

Karya ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis akan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Drs. Agus Wahyudin, M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
3. Bapak Amir Mahmud, S.Pd. M.Si, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
4. Bapak Drs. Heri Yanto, MBA, selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan dan masukan yang diberikan hingga terselesaikannya karya ini.
5. Ibu Nanik Sri Utaminingsih, SE. M.Si selaku Dosen Pembimbing II atas nasihat dan solusi yang diberikan dengan penuh ketelitian dan kesabaran.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi atas ilmu pengetahuan yang diberikan selama belajar di Universitas Negeri Semarang.
7. Semua teman di Akuntansi kelas reguler dan paralel angkatan 2005 atas bantuan dan dukungannya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala komentar, kritik, dan saran yang membangun atas karya ini sangat Penulis harapkan.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, terutama untuk memperluas khasanah keilmuan.

Semarang, 7 Agustus 2009

Penulis

Riana Afiati Mufidah



ABSTRAK

Riana Afiati Mufidah. 2009. *Pengaruh Kebijakan Sistem Office Channeling Terhadap Kinerja Perbankan Syariah.* Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Kata Kunci : Kinerja, Perbankan syariah, *Office channeling*

Implementasi konsep *office channeling* memungkinkan suatu bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah untuk membuka layanan syariah di semua kantor yang dimilikinya termasuk di kantor-kantor bank konvensional. Adanya perubahan kebijakan ini sedikit banyak telah mempengaruhi kinerja dari perbankan syariah itu sendiri. Berbagai faktor internal dan eksternal dapat menghambat dan atau membantu suatu bank untuk mencapai tujuan jangka panjang dan tujuan tahunannya. Oleh karena itu, perlu adanya penilaian kinerja untuk membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan "apakah terdapat perbedaan pada kinerja perbankan syariah sebelum dan setelah diterapkannya kebijakan *office channeling*?"

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis perbandingan data kuantitatif berupa angka-angka rasio keuangan yang diukur dengan rasio *CAMELS* guna menganalisa pengaruh penerapan kebijakan *office channeling* terhadap kinerja perbankan syariah. Namun dalam kenyataan di lapangan beberapa aspek yakni *capital*, *assets* dan *sensitivity to market risk* tidak dapat dihitung rasionya dikarenakan ketidaksesuaian teori dengan praktik di lapangan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPM, REO dan RABP masing-masing mengalami rata-rata peningkatan sebesar 3,83%, 4,5% dan 1,64% setelah diterapkannya kebijakan sistem *office channeling*. Sedangkan ROA mengalami rata-rata penurunan sebesar 0,1% setelah diterapkannya kebijakan sistem *office channeling*.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: (1) Tidak ada perbedaan yang signifikan pada aspek kualitas manajemen antara sebelum dan sesudah penerapan kebijakan *office channeling*. (2) Tidak ada perbedaan yang signifikan pada aspek rentabilitas atau *earning* antara sebelum dan sesudah penerapan kebijakan *office channeling* dan (3) Ada perbedaan yang signifikan pada aspek likuiditas antara sebelum dan sesudah penerapan kebijakan *office channeling*. Dari kesimpulan tersebut, maka dapat diajukan saran antara lain: (1) Ada baiknya Bank Indonesia sebagai regulator meninjau kembali PBI No.8/3/PBI/2006 karena dikhawatirkan kebijakan ini kurang efektif untuk diterapkan. (2) Bank-bank konvensional yang menerapkan sistem *office channeling* hendaknya terus melakukan perbaikan dan peningkatan sumber daya manusia khususnya pemahaman tentang perbankan syariah serta bersama Bank Indonesia untuk lebih gencar mempromosikan keunggulan produk perbankan syariah kepada masyarakat luas.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN REKOMENDASI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Pembatasan Masalah	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1. Kinerja	7
2.1.1. Penilaian Kinerja	7
2.1.2. Kinerja Perbankan Syariah	14
2.2. Bank Syariah	16
2.2.1. Pengertian Bank Syariah	16
2.2.2. Prinsip bank Syariah	17
2.2.3. Produk Bank Syariah	18
2.2.4. Peranan Bank Syariah	25

2.3. Perbedaan Antara Bank Syariah dengan	
Bank Konvensional	26
2.4. <i>Office Channeling</i>	28
2.4.1. Pengertian <i>Office Channeling</i>	28
2.4.2. Tujuan <i>Office Channeling</i>	29
2.4.3. Kelebihan dan Kekurangan <i>Office Channeling</i>	29
2.5. Kerangka Berpikir	33
2.6. Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Jenis dan Desain Penelitian	37
3.2. Populasi dan Sampel	37
3.3. Variabel	38
3.4. Sumber Data	40
3.5. Teknik Pengumpulan Data	41
3.6. Teknik Pengolahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1. Hasil Penelitian.....	44
4.1.1. Deskripsi Variabel	44
4.1.2. Uji Hipotesis	57
4.2. Pembahasan	59
BAB V PENUTUP	65
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	71

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional	28
Tabel 2.2 Kelebihan dan Kekurangan <i>Office Channeling</i>	33
Tabel 4.1 Perubahan Total Aktiva	46
Tabel 4.2 Perubahan Antar Bank Pasiva	48
Tabel 4.3 Perubahan Total Kewajiban	49
Tabel 4.4 Perubahan Beban Personalia	51
Tabel 4.5 Perubahan Beban Operasional	52
Tabel 4.6 Perubahan Laba	53
Tabel 4.7 Perubahan NPM	54
Tabel 4.8 Perubahan ROA dan REO	55
Tabel 4.9 Perubahan RABP	56
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas Data (<i>Shapiro-Wilk Test</i>)	58
Tabel 4.11 Hasil Uji Beda pada Aspek Manajemen	59
Tabel 4.12 Hasil Uji Beda pada Aspek Rentabilitas (<i>Earning</i>)	59
Tabel 4.13 Hasil Uji Beda pada Aspek Liquiditas	59
Tabel 4.14 Perubahan Piutang Murabaha dan Pembiayaan Mudharabah serta Musyarakah	61
Tabel 4.15 Perubahan Dana Wadiah dan Investasi Tidak Terikat	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	35
Gambar 4.1 Perubahan Total Aktiva	45
Gambar 4.2 Perubahan Antar Bank Pasiva	47
Gambar 4.3 Perubahan Total Kewajiban	49
Gambar 4.4 Perubahan Beban Operasional	51
Gambar 4.5 Perubahan Laba	53



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Laporan Keuangan Unit Usaha Syariah Bank Bukopin	71
Lampiran 2. Laporan Keuangan Unit Usaha Syariah Bank CIMB Niaga	91
Lampiran 3. Laporan Keuangan Unit Usaha Syariah Bank DKI	111
Lampiran 4. Laporan Keuangan Unit Usaha Syariah Bank BPD Aceh	131
Lampiran 5. Laporan Keuangan Unit Usaha Syariah Bank BPD Jawa Barat dan Banten	151
Lampiran 6. Laporan Keuangan Unit Usaha Syariah Bank Rakyat Indonesia	171
Lampiran 7. Hasil Perhitungan NPM (dalam persen)	191
Lampiran 8. Hasil Perhitungan ROA (dalam persen)	192
Lampiran 9. Hasil Perhitungan REO (dalam persen)	193
Lampiran 10. Hasil Perhitungan RABP (dalam persen)	194
Lampiran 11. Uji Normalitas Data	195
Lampiran 12. Uji Hipotesis	196

PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Krisis demi krisis melanda perekonomian dunia hingga banyak bank konvensional yang gulung tikar. Di negara Indonesia saja pada tahun 2001 telah ada 63 bank yang sudah tutup, 14 bank telah di *take over* dan 9 bank lagi harus direkapitulasi dengan biaya trilyunan rupiah (Syafi'i dalam Syamhudi 2008).

Tingginya tingkat bunga pada masa krisis, telah secara langsung berdampak buruk pada kinerja bank-bank konvensional. Hal ini mendorong tekad para peneliti untuk menerapkan sistem ekonomi Islam (*Islamic Economic System*) dengan mengkonsep perbankan syariah sebagai alternatif pengganti perbankan konvensional.

Sistem ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang melandaskan segala aktifitas-aktifitas ekonominya pada peraturan Islam, yaitu Al Qur'an dan Hadits. Di dalamnya norma dan etika merupakan hal yang diperhatikan oleh seseorang dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, sehingga seorang manusia dalam beraktifitas ekonomi haruslah menjadi suatu amal kebaikan yang memberi manfaat (*fallah*) dan tidak merugikan siapapun. Manusia haruslah merasa bahwa segala aktifitasnya diawasi oleh Tuhan dan akan mendapatkan balasan atas apa yang ia lakukan kelak.

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Quran, Hadist, *ijma'* dan *qiyas*.

Sebagai implementasi sistem ini dalam masyarakat modern, berbagai lembaga dan institusi keuangan yang berdasarkan pada nilai dan tatanan Islam atau biasa lebih dikenal Lembaga Keuangan Syariah (LKS) didirikan sebagai lembaga yang memberikan jasa-jasa keuangan syariah dan menjawab kebutuhan umat Islam akan institusi yang dapat mengelola keuangan mereka secara syariah. Lembaga Keuangan Syariah yang terdiri dari lembaga-lembaga perbankan maupun non perbankan inilah yang diharapkan ke depan akan mampu menjadi solusi bagi masalah-masalah keuangan yang melanda dunia.

Di Indonesia yang memiliki jumlah pemeluk agama Islam lebih dari 80% dari total penduduknya, perkembangan institusi syariah diawali dengan berdirinya bank syariah pertama, yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992, disusul dengan Bank Syariah Mandiri dan institusi lainnya, baik berupa BPR Syariah, Unit Usaha Syariah, maupun Bank Syariah. Keberadaan Perbankan Syariah semakin kokoh dengan penggantian UU No.7 Tahun 1992 dengan UU No.10 Tahun 1998 yang mengatur mengenai landasan hukum seret jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh perbankan syariah. Undang-Undang ini memberikan arahan bagi perbankan konvensional mengenai pembukaan cabang syariah atau konversi ke perbankan syariah.

Keberhasilan perbankan syariah tersebut tidak lepas dari peran berbagai pihak, antara lain Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengatur perbankan di Indonesia, telah beberapa kali mengeluarkan kebijakan serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perbankan syariah.

Hasil penelitian dan permodelan potensi serta preferensi masyarakat terhadap bank syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2005, menunjukkan masih tingginya minat dari masyarakat akan layanan jasa perbankan syariah. Namun, di sisi lain sejumlah responden juga mengeluhkan akan kurangnya kualitas pelayanan serta masih rendahnya keterjangkauan akses masyarakat terhadap perbankan syariah. Di sisi perbankan syariah pun mengeluhkan akan tingginya biaya operasional yang harus dikeluarkan dalam memperlebar jangkauan kepada masyarakat karena selama ini peraturan Bank Indonesia yang memperbolehkan bank untuk menyediakan jasa layanan syariah dengan mendirikan kantor cabang, kas, maupun kantor pembantu dirasakan kurang menguntungkan karena untuk mendirikan sebuah kantor atau unit usaha syariah tidaklah murah.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, jangkauan pelayanan jasa bank syariah menjadi semakin luas. Setelah di keluarkannya peraturan tersebut, maka muncullah istilah *office channeling* yang merupakan suatu mekanisme kerjasama kegiatan penghimpunan dana antar kantor cabang syariah sebagai kantor induk dengan kantor cabang konvensional bank yang sama, biasanya dalam satu daerah, baik dalam bentuk giro, tabungan maupun deposit.

Implementasi konsep *office channeling* ini memungkinkan suatu bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah untuk membuka layanan syariah di semua kantor yang dimilikinya termasuk di kantor-kantor bank konvensional.

Sementara itu, adanya perubahan kebijakan ini sedikit banyak telah mempengaruhi kinerja dari perbankan syariah itu sendiri. Berbagai faktor internal dan eksternal dapat menghambat dan atau membantu suatu bank untuk mencapai tujuan jangka panjang dan tujuan tahunannya. Secara eksternal, tindakan para pesaing, perubahan teknologi, perubahan ekonomi, perpindahan demografi dan tindakan pemerintah dapat menghambat dan atau membantu pencapaian tujuan organisasi. Secara internal, strategi yang dipilih atau implementasi yang dilakukan dapat pula menghambat dan atau membantu pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, perlu adanya penilaian kinerja untuk membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dan menilai perkembangan yang terjadi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

David (2006) mengatakan bahwa penilaian kinerja sangat penting karena perusahaan menghadapi lingkungan yang dinamis dimana faktor-faktor internal maupun eksternal sering berubah dengan cepat dan dramatis.

Berdasarkan pernyataan David di atas, maka dapat dicontohkan salah satu dari faktor eksternal tersebut adalah kebijakan pemerintah yang pada penelitian ini adalah kebijakan penerapan sistem *office channeling*.

Kriteria kuantitatif yang umum digunakan dalam penilaian kinerja adalah rasio keuangan. Namun, David (2006) mengatakan bahwa :

Terdapat beberapa potensi masalah yang berkaitan dengan penggunaan kriteria kuantitatif untuk mengevaluasi kinerja. Pertama, sebagian besar kriteria kuantitatif lebih mengacu pada tujuan tahunan dari pada tujuan jangka panjang. Kedua, metode akuntansi yang berbeda bisa menghasilkan hasil yang berbeda dalam berbagai kriteria kuantitatif. Ketiga, penilaian secara intuitif hampir selalu dilakukan dalam penjabaran kriteria kuantitatif.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dan alasan lainnya, kriteria kualitatif juga dibutuhkan dalam menilai kinerja. Faktor manusia seperti tingkat ketidakhadiran dan rasio *turn over* yang tinggi, kualitas dan kuantitas produksi yang rendah, merupakan penyebab turunya kinerja. Faktor-faktor dalam pemasaran, keuangan/akuntansi, litbang, atau sistem informasi manajemen juga dapat menimbulkan masalah keuangan.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai kinerja dari perbankan syariah sebelum dan setelah di keluarkannya Peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan kebijakan *office channeling* oleh kantor bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah.

1.2. Perumusan Masalah

Perubahan kebijakan pada suatu bank akan berpengaruh pula pada hasil kinerja organisasi. Hal tersebut dikarenakan keterkaitan implementasi suatu strategi yang ditetapkan dengan kinerja yang dihasilkan oleh suatu bank. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

”Apakah terdapat perbedaan pada kinerja perbankan syariah sebelum dan setelah diterapkannya kebijakan *office channeling* ?”

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini akan dikaji penilaian kinerja bank dari sisi manajemen (*management*), *earning*, dan likuiditas (*liquidity*) dengan menggunakan data laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan kebijakan *office channeling*.

1.4. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja perbankan syariah sebelum dan setelah diterapkannya kebijakan sistem *office channeling*.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi kegunaan sebagai berikut :

1. Memberi informasi kepada perusahaan yang menjadi obyek penelitian tentang perbedaan rasio keuangan sebelum dan setelah diterapkannya kebijakan sistem *office channeling*.
2. Dengan penelitian ini diharapkan perusahaan dapat memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang mungkin terdapat dalam rasio keuangannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kinerja

2.1.1. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja menurut Mulyadi (1997) adalah :

Penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam organisasi.

Penilaian kinerja adalah proses penilaian hasil karya personel dalam organisasi melalui instrumen penilaian kinerja. Pada hakekatnya penilaian kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap kinerja personil dengan membandingkannya dengan urutan yang ada. Penilaian kinerja merupakan proses yang berkelanjutan untuk menilai kualitas kerja personil dalam usaha menampilkan kerja personil dalam organisasi.

Kinerja dapat berubah setiap waktu secara dinamis, Hunger (2003) menyatakan "... tercapainya kesesuaian antara lingkungan organisasi dan strategi, struktur serta proses organisasi, berpengaruh positif terhadap kinerja". Hunger juga memaparkan bahwa :

...lingkungan organisasi dibagi menjadi dua bagian yakni lingkungan internal yang biasa disebut dengan manajemen strategi yang meliputi empat elemen dasar yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian. Sedangkan lingkungan eksternal memiliki dua bagian yakni lingkungan kerja yang meliputi pemegang saham, pemerintah, pemasok, komunitas lokal, pesaing, pelanggan, kreditur, serikat buruh, kelompok kepentingan khusus dan asosiasi pedagang.... dan kelompok

eksternal yang kedua adalah lingkungan sosial yang terdiri dari kekuatan-kekuatan umum yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas jangka pendek organisasi tetapi dapat dan sering mempengaruhi keputusan-keputusan jangka panjang organisasi seperti kekuatan-kekuatan ekonomi, sosiokultural, teknologi dan politik-hukum...

Menurut Gomes (2003) tujuan penilaian kinerja secara umum dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:

1. Untuk me-*reward* kinerja sebelumnya (*to reward past performance*)
2. Untuk memotivasi perbaikan performansi pada waktu yang akan datang (*tomotivate future performance improvement*)

Dunia perbankan lebih sering menggunakan metode analisis *CAMELS* dalam menilai kinerjanya. Pelayanan dibidang keuangan menjadi alasan digunakannya analisis ini karena cenderung menekannya pada penilaian kinerja keuangan dibanding kinerja non keuangannya. Sedangkan untuk perusahaan non perbankan, dewasa ini telah banyak yang menggunakan metode *Balanced Scorecard* dalam menilai kinerjanya. Strategi untuk menciptakan nilai telah bergeser dari mengatur aset yang terlihat menjadi strategi berbasis pengetahuan yang menciptakan dan menyebarkan aset tak terlihat organisasi, termasuk hubungan dengan pelanggan; jasa dan produk yang inovatif; proses operasi yang responsif dan berkualitas tinggi; keahlian dan pengetahuan dari karyawan; teknologi informasi yang mendukung karyawan dan menghubungkan perusahaan dengan para pemasoknya; dan iklim organisasi yang membantu inovasi, pemecahan masalah, serta pengembangan. Kriteria yang lebih kompleks inilah menjadikan *Balanced Scorecard* lebih banyak dipilih oleh perusahaan belakangan ini. Secara garis besar, model penilaian kinerja terdiri dari:

1. Penilaian Kinerja dengan Model *Return On Equity (ROE)*

Pada tahun 1972, David Cole memperkenalkan cara untuk mengevaluasi kinerja melalui analisis rasio. ROE adalah salah satu rasio yang digunakan untuk menganalisis tingkat profitabilitas perusahaan. Tujuan analisis profitabilitas adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. ROE menunjukkan kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan *net income*.

2. Penilaian Kinerja dengan Analisis *CAMELS*

Analisis *CAMELS* sering kali digunakan dalam penilaian kinerja sebuah bank. Dalam melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan, Bank Sentral biasanya menggunakan kriteria *CAMELS*, yaitu *Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity to market risk*. Kriteria yang disebut terakhir baru dipergunakan di Amerika sejak Januari 1997. Di Indonesia, Bank Indonesia sebagai regulator telah mengeluarkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan bank melalui Surat Edaran BI No.6/ 23 /DPNP perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang Melaksanakan Usaha Secara Konvensional dan Surat Edaran BI No.9/24/DPbS perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut Putri (2008) aturan Bank Indonesia ini pada prinsipnya menghendaki perbankan untuk tetap mengacu pada tingkat kesehatan bank berdasarkan penilaian kinerja dengan menggunakan ukuran *CAMELS*.

CAMELS pada dasarnya merupakan metode penelitian kesehatan bank, yang meliputi enam kriteria:

a. Permodalan (*capital*)

Modal merupakan faktor yang penting dalam rangka pengembangan usaha dan untuk menampung risiko kerugiannya. Modal berfungsi untuk membiayai operasi, sebagai instrument untuk mengantisipasi rasio, dan sebagai alat untuk ekspansi usaha.

b. Kualitas aset (*asset quality*)

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul.

c. Manajemen (*management*)

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian dan komitmen bank kepada bank sentral.

d. Rentabilitas (*earnings*)

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba.

e. Likuiditas (*liquidity*)

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul.

f. Sensitivitas atas risiko pasar (*sensitivity to market risk*)

Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dimaksudkan untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar. Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dilakukan dengan menilai besarnya kelebihan modal yang digunakan untuk menutup risiko bank dibandingkan dengan besarnya risiko kerugian yang timbul dari pengaruh perubahan risiko pasar.

Namun terkadang karena beberapa sebab, *CAMELS* tidak bisa secara utuh digunakan dalam menilai kinerja pada sebuah bank. Misalnya penilaian kinerja Unit Usaha Syariah pada aspek capital atau permodalan tidak dapat diukur karena modal pada Unit Usaha Syariah masih bergabung pada bank konvensionalnya meskipun ia memiliki laporan keuangan secara terpisah.

3. Penilaian Kinerja dengan *Balanced Scorecard*

Konsep *Balanced Scorecard* berkembang sejalan dengan perkembangan implementasinya. *Balanced scorecard* terdiri dari dua kata: (1) kartu skor (*scorecard*) dan (2) berimbang (*balanced*). Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja seseorang. Kartu skor ini dapat juga digunakan untuk merencanakan skor yang hendak dicapai atau yang diwujudkan personel di masa depan. Kata berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja personel diukur secara berimbang dari dua aspek: keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan ekstern.

Menurut Kuncoro (2006) *Balanced Scorecard* mengukur kinerja organisasi dengan menggunakan pengukuran keuangan dan non keuangan pada empat perspektif, yaitu:

- a. Perspektif keuangan, merupakan fokus utama dari tujuan dan ukuran di antara keempat perspektif lainnya. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah strategi perusahaan, implementasi dan pelaksanaan strategi memberikan perbaikan yang mendasar pada kontribusi laba yang diperoleh perusahaan.
- b. Perspektif pelanggan, merupakan suatu indikator pelanggan dan segmen pasar yang akan dimasuki, yang telah diidentifikasi oleh perusahaan. Segmen pasar adalah sumber pendorong penghasilan tujuan finansial perusahaan. Suatu pernyataan manajemen terkini adalah pentingnya fokus pada pelanggan dan kepuasan pelanggan, sehingga apabila pelayanan perusahaan tidak memuaskan para pelanggan, maka mereka akan mencari produsen lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kinerja yang buruk dari perspektif ini akan dapat menurunkan jumlah pelanggan di masa depan meskipun saat ini kinerja keuangan perusahaan terlihat baik.
- c. Proses bisnis internal, perusahaan mengedepankan analisis terhadap nilai jaringan. Manajemen mengidentifikasi proses bisnis secara kritis yang harus diunggulkan perusahaan. Peranan kartu skor dalam perspektif ini untuk memudahkan manajer mengetahui seberapa baik bisnis mereka berjalan dan apakah produk atau jasa yang dihasilkan telah sesuai dengan misi perusahaan, oleh karena itu dirasakan perlu untuk menentukan rantai nilai internal yang lengkap.

d. Proses pembelajaran dan pertumbuhan, bersumber dari faktor sumber daya manusia, sistem, dan prosedur organisasi yang berperan dalam pertumbuhan jangka panjang. Kaplan dan Norton dalam Prihandini (2006) menyebutkan bahwa ada tiga kategori dalam perspektif ini, yaitu:

1) Kapabilitas pekerja

Salah satu perubahan yang paling dramatis dalam pemikiran manajemen selama 15 tahun terakhir adalah pergeseran peran para pekerja perusahaan. Saat ini pekerja dituntut untuk lebih kritis dan melakukan evaluasi terhadap proses dan lingkungan, dan memberikan usulan perbaikan bagi perusahaan di masa depan.

2) Kapabilitas sistem informasi

Motivasi dan keahlian pekerja saja tidak cukup dalam menunjang pencapaian tujuan proses bisnis internal, tanpa adanya informasi yang tepat waktu, cepat dan akurat sebagai umpan balik. Dengan kemampuan sistem informasi yang memadai, kebutuhan seluruh tingkatan manajemen dan pekerja atas informasi yang akurat dan tepat waktu dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya.

3) Motivasi, pemberdayaan dan keselarasan

Pegawai yang memiliki informasi yang berlimpah tidak akan memberikan kontribusi pada keberhasilan usaha, apabila mereka tidak mempunyai motivasi untuk bertindak selaras dengan tujuan perusahaan atau tidak diberi kebebasan dalam pengambilan keputusan atau bertindak.

2.1.2. Kinerja Perbankan Syariah

Sama seperti halnya pada bank konvensional, bank syariah pun harus menilai kinerjanya guna membandingkan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, terdapat perbedaan pada sistem pengaturan internal antara bank syariah dengan bank konvensional yakni adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada bank syariah guna mengawasi kegiatan bank syariah agar beroperasi sesuai dengan hukum Islam sehingga bank syariah tidak saja melaksanakan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian, namun juga berdasar pada prinsip syariah dalam rangka menjaga atau meningkatkan kinerjanya.

Menurut Kusumo (2008) penilaian kinerja bank syariah di Indonesia didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

1. Permodalan (*capital*) yang meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. kecukupan, proyeksi (*trend* ke depan) permodalan dan kemampuan permodalan dalam mengcover risiko;
 - b. kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham.
2. Kualitas aset (*asset quality*) yang meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. kualitas aktiva produktif, perkembangan kualitas aktiva produktif bermasalah, konsentrasi eksposur risiko, dan eksposur risiko nasabah inti.
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (*review*) internal, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.
3. Manajemen (*management*) yang meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. kualitas manajemen umum, penerapan manajemen risiko terutama pemahaman manajemen atas risiko Bank atau UUS;
 - b. kepatuhan Bank atau UUS terhadap ketentuan yang berlaku, komitmen kepada Bank Indonesia maupun pihak lain, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah termasuk edukasi pada masyarakat, pelaksanaan fungsi sosial.
4. Rentabilitas (*earning*) yang meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. kemampuan dalam menghasilkan laba, kemampuan laba mendukung ekspansi dan menutup risiko, serta tingkat efisiensi;
 - b. diversifikasi pendapatan termasuk kemampuan bank untuk mendapatkan *fee based income*, dan diversifikasi penanaman dana, serta penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya.
5. Likuiditas (*liquidity*) yang meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi *maturity mismatch*, dan konsentrasi sumber pendanaan;

- b. kecukupan kebijakan pengelolaan likuiditas, akses kepada sumber pendanaan, dan stabilitas pendanaan.
6. Sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*) yang meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. kemampuan modal Bank atau UUS mengcover potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi (*adverse movement*) nilai tukar;
 - b. kecukupan penerapan manajemen risiko pasar.

2.2. Bank Syariah

2.2.1. Pengertian Bank Syariah

Kata bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Perancis, dan dari kata *banco* dari kata Italia, yang mempunyai arti lemari atau bangku. Kata lemari berarti fungsi sebagai alat penyimpanan barang-barang berharga. Mohammad Boudjellal dalam Tokay (2007) mengatakan bahwa :

Dalam Al Quran istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi, jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban, maka dalam Al Quran hal tersebut diterangkan secara jelas, seperti, *zakat*, *sadaqoh*, *ghanimah* atau rampasan perang, *ba'i* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta), dan sebagainya yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.

Sedangkan pada umumnya istilah bank syariah berarti lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sementara menurut Bank IFI dalam www.bankifi.co.id, mengartikan bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Jadi, Bank Islam atau bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga. Bank syariah merupakan lembaga keuangan bank yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.

2.2.2. Prinsip Bank Syariah

Islam mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu juga Islam disebut agama yang fitrah atau yang sesuai dengan sifat dasar manusia. Bagi masyarakat modern, aktivitas keuangan dan perbankan dipandang sebagai wahana untuk membawa kepada setidaknya dua ajaran dalam Al-Quran, yakni :

1. Prinsip *Ta'awun*

Merupakan prinsip untuk saling membantu dan bekerja sama antara anggota masyarakat dalam kebaikan.

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (QS. Al-Maidah:2)

2. Prinsip Menghindari *Al-Ikhtinaz*

Seperti membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..." (QS. An-Nisaa':29)

Dalam perbankan syariah dilarang keras melakukan transaksi apabila terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya unsur ketidakpastian atau tipu muslihat dalam transaksi (*gharar*)
- b. Adanya unsur judi yang transaksinya bersifat spekulatif yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak dan keuntungan bagi pihak lain (*maysir*)
- c. Transaksi menggunakan sistem bunga (*riba*)

2.2.3. Produk Bank Syariah

Menurut "Kodifikasi Produk Perbankan Syariah" yang di keluarkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, produk perbankan syariah dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Produk Pengimpunan Dana

a. Giro Syariah

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah membayar lainnya, atau dengan memindahbukukan.

b. Tabungan Syariah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

c. Deposito Syariah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dengan bank.

2. Produk Penyaluran Dana

a. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Mudharabah*

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- 3) Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*;
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan

- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Musyarakah*

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- 3) Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*;
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

c. Pembiayaan Atas Dasar *Murabahah*

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- 3) Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*;
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

d. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Salam*

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- 3) Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*;
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan

5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

e. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Istishna'*

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- 3) Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*;
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

f. Pembiayaan Atas Dasar Akad *Ijarah*

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- 3) Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*;
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

g. Pembiayaan Atas Dasar Akad Qardh

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- 3) Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*;
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan

5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

h. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- 3) Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*;
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

3. Layanan Jasa

a. Letter Of Credit (L/C) Impor Syariah

L/C impor adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir (*Beneficiary*) yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits/UCP*)

b. Bank Garansi Syariah

Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud.

c. Penukaran Valuta Asing (Sharf)

Penukaran Valas merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (*single currency*) maupun berbeda (*multi currency*), yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh nasabah.

2.2.4. Peranan Bank Syariah

Peranan bank syariah tidak dapat dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan perbankan syariah itu sendiri. Diantara peranan bank syariah adalah :

1. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat
2. Meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen pangsa pasar perbankan syariah
3. Menjalani kerja sama dengan para ulama karena bagaimana pun peran ulama khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam

Dengan adanya bank syariah, diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.

Peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud diantaranya sebagai perekat nasionalisme baru, memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan, memberikan return yang baik, mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, mendorong pemerataan pendapatan, peningkatan efisiensi mobilitas dana, dan yang utama sebagai *uswatun hasanah*.

2.3. Perbedaan Antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Sepanjang praktik perbankan konvensional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka bank-bank syariah telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada. Namun, apabila terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka bank-bank syariah merencanakan dan menerapkan sistem sendiri guna menyesuaikan aktivitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Maka, secara operasional akan terdapat terdapat perbedaan-perbedaan yang substantif antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional, seperti akad dan aspek legalitas pada bank syariah menggunakan landasan hukum Islam dan hukum positif yang telah berlaku di Indonesia. Hal ini jelas berbeda dengan bank konvensional yang hanya menggunakan landasan hukum positif

sehingga tidak ada nilai-nilai keIslaman dalam menjalankan aktivitasnya. Dari sisi struktur organisasi, pada perbankan syariah terdapat adanya Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi sebagai pengawas aktivitas bank syariah agar tidak terjadi percampuran transaksi syariah dan konvensional yang dapat melanggar hukum Islam. Hal ini tidak terdapat pada perbankan konvensional yang hanya melandaskan aktivitasnya pada hukum positif, sehingga tidak perlu adanya DSN dan DPS karena dapat dipastikan tidak akan terjadi percampuran transaksi.

Sementara itu, ditinjau dari berbagai jenis investasinya, bank syariah menjamin bahwa semua investasi pada bank syariah adalah halal karena tidak mengandung riba. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang menganut sistem riba. Maka dalam hal ini, investasi pada bank konvensional tidak semuanya dijamin halal. Perbedaan pada sistem investasi ini secara langsung juga akan berdampak pada perbedaan prinsip operasional pada masing-masing bank. Pada bank syariah yang tidak menganut sistem riba menggunakan prinsip operasional bagi hasil, jual beli dan sewa. Sedangkan pada bank konvensional yang menganut sistem riba, menggunakan prinsip operasional perangkat bunga.

Pada dasarnya, setiap perusahaan yang didirikan bertujuan untuk mencari laba. Namun pada bank syariah, tujuan itu dibarengi dengan tujuan yang mulia yakni tujuan amal kebaikan yang memberi manfaat (*fallah oriented*). Hal ini berbeda dengan tujuan bank konvensional yang hanya bertujuan untuk mencari laba (*profit oriented*). perbedaan tujuan pada masing-masing bank ini juga berdampak pada hubungan bank dengan nasabahnya. Bank syariah yang

menekankan dua tujuan yakni *profit oriented* dan *falah oriented* memaknai hubungan dengan nasabah sebagai mitra. Sedangkan pada bank konvensional hubungan dengan nasabah dimaknai sebagai debitor dan/atau kreditor.

Lebih jelas perbedaan-perbedaan itu tersaji seperti pada tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

No	Keterangan	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Akad dan Aspek Legalitas	Hukum Islam dan Hukum Positif	Hukum Positif
2	Struktur Organisasi	Ada dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada DSN dan DPS
3	Investasi	Halal	Halal dan haram
4	Prinsip Operasional	Bagi hasil, jual beli, sewa	Perangkat bunga
5	Tujuan	<i>Profit dan fallah oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
6	Hubungan Nasabah	Kemitraan	Debitor dan Kreditor

Sumber: Wirduyaningsih, dkk (2005)

2.4. Office Channeling

2.4.1. Pengertian Office Channeling

Zubairi Hasan (2008) mendefinisikan “*Office channeling* sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan kantor bank umum konvensional dalam melayani transaksi-transaksi dengan skim syariah, dengan syarat bank bersangkutan telah memiliki Unit Usaha Syariah.”

Sedangkan *office channeling* menurut Edit Estetika (2008) adalah layanan syariah yang meliputi kegiatan perbankan dalam menghimpun dana, pembiayaan

dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasar prinsip syariah yang dilakukan di kantor cabang pembantu, untuk dan atas nama kantor cabang syariah pada bank yang sama.

Jadi artinya, masyarakat bisa mengakses layanan perbankan syariah di kantor cabang konvensional. Secara singkat, pengertian *office channeling* adalah bahwa nasabah bisa melakukan segala transaksi keuangan syariah di perbankan konvensional.

2.4.2. Tujuan *Office Channeling*

Tujuan utama diterapkannya kebijakan *office channeling* adalah :

1. Untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia
2. Meminimumkan dan mengefisiensikan biaya ekspansi bank syariah yang akan memperluas jaringannya
3. Mengarahkan aktivitas perbankan agar mampu menunjang pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan perbankan syariah

2.4.3. Kelebihan dan Kekurangan *Office Channeling*

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, peraturan tentang kegiatan perbankan syariah telah lebih dulu dibahas dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang kemudian didukung PBI No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasar Prinsip Syariah.

Pemberlakuan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 ini merupakan momen pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut membuka kesempatan untuk pengembangan jaringan perbankan syariah, antara lain melalui izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, bank konvensional dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Landasan dan kepastian hukum yang kuat bagi para pelaku bisnis serta masyarakat luas ini meliputi:

1. Pengaturan aspek kelembagaan dan kegiatan usaha dan bank Islam sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Pasal tersebut menjelaskan, bahwa bank umum dapat memilih untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan sistem konvensional atau berdasarkan prinsip syariah atau melakukan kedua kegiatan tersebut. Dalam hal bank umum melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariah, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan membuka satuan kerja dan kantor cabang khusus, yaitu Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabang Syariah.
2. Bank umum konvensional yang akan membuka kantor cabang syariah wajib melaksanakan:
 - a. Pembentukan Unit Usaha Syariah (UUS);
 - b. Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN); dan
 - c. Menyediakan modal kerja yang disisihkan oleh bank dalam suatu rekening tersendiri atas nama UUS yang dapat digunakan untuk membayar biaya

kantor dan izin-izin berkaitan dengan kegiatan operasional maupun non-operasional Kantor Cabang Syariah (KCS).

Tanggal 30 Januari 2006, Bank Indonesia menetapkan peraturan baru tentang Perubahan Kegiatan Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, yakni PBI No.8/3/PBI/2006. Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka pengembangan jaringan perbankan syariah di Indonesia menjadi lebih luas dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Hal baru yang diatur dalam PBI No.8/3/PBI/2006 yang berkaitan dengan pengembangan jaringan perbankan syariah di Indonesia adalah adanya mekanisme layanan syariah. Layanan syariah adalah kegiatan penghimpunan dana yang dilakukan kantor cabang dan atau di kantor dibawah kantor cabang untuk dan atas nama kantor cabang syariah pada bank yang sama. Hal ini berarti PBI telah membuka kemungkinan layanan penghimpunan dana yang dilakukan bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Pada tanggal 16 Juli 2008, PBI ini kemudian diperkuat dengan diundangkannya UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan layanan syariah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Rencana Layanan Syariah wajib dicantumkan dalam rencana bisnis bank yang telah mendapat penegasan dari Bank Indonesia.
2. Layanan syariah dapat dibuka:

- a. dalam satu wilayah kerja kantor Bank Indonesia dengan kantor cabang syariah induknya;
 - b. dengan menggunakan pola kerja sama antara kantor cabang syariah induknya dengan kantor cabang dan atau kantor cabang pembantu; dan
 - c. dengan menggunakan sumber daya manusia sendiri bank yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan operasional bank syariah.
3. Layanan syariah wajib:
- a. memiliki pencatatan dan pembukuan yang terpisah dari kantor cabang dan atau kantor cabang pembantu;
 - b. menggunakan standar akuntansi yang berlaku bagi perbankan syariah;
 - c. melaporkan keuangan layanan syariah dengan menggabungkan laporan keuangan kantor cabang syariah induknya pada hari yang sama.

Sementara itu, pemberlakuan kebijakan sistem *office channeling* pada ini di dasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/26/DPbS perihal Perubahan Kegiatan Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, yang menyatakan bahwa kebijakan sistem *office channeling* resmi berlaku pada bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah sejak 1 Januari 2007.

Bagai dua sisi mata uang, dampak positif dan negatif menjadi hal yang tidak pernah bisa dipisahkan. Seperti halnya kebijakan-kebijakan yang lain, pada

kebijakan layanan syariah (*office channeling*) ini juga terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan yang tidak bisa dihindari.

Kelebihan dan kekurangan *office channeling* dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2 Kelebihan dan Kekurangan *Office Channeling*

No	Kelebihan	Kekurangan
1	Bank syariah leluasa berkembang dan memiliki persaingan ketat dengan bank konvensional	Modal tergantung komitmen bank induk. Jika menguntungkan, modal bisa ditambah. Tetapi, jika kurang prospek, keberadaannya hanya sekedar mengikuti tren
2	Kemurnian syariah tetap bisa dijaga dengan pemisahan dua pintu	Industri perbankan di Indonesia mayoritas masih dipegang oleh bank konvensional
3	Keberadaannya tersebar di mana-mana, karena jumlah kantor layanan besar, sehingga memudahkan untuk berkembang lebih luas	

Sumber: Hamid (2006)

2.5. Kerangka Berpikir

Dalam rangka akselerasi pencapaian market share bank syariah, Bank Indonesia sejak tahun 2006 mengeluarkan kebijakan baru bagi industri perbankan syariah, yaitu PBI No 8/3/PBI/2006. Materi paling penting pada peraturan tersebut adalah penerapan *office channeling* bagi bank-bank syariah. Kebijakan ini merupakan inovasi dan terobosan baru yang bisa dibilang spektakuler bagi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Kebijakan *office channeling* juga dimaksudkan untuk meningkatkan akses masyarakat kepada jasa perbankan syariah. Dengan sistem baru ini bank syariah tidak perlu lagi membuka

cabang Unit Usaha Syariah di banyak tempat dalam memberikan pelayanan perbankan syariah. Sehingga biaya ekspansi jauh lebih efisien. Penerapan *office channeling*, akan semakin memudahkan masyarakat melakukan transaksi syariah. Dengan kata lain, akses terhadap lokasi bank syariah yang selama ini menjadi kendala akan dapat teratasi, karena selama ini masyarakat yang mau bertransaksi dengan bank syariah mengalami kesulitan karena belum banyak bank syariah yang beroperasi di Indonesia. Dengan *office channelling* kendala tersebut bisa teratasi. Berdasarkan realita di atas, maka pelayanan *office channelling* ini, seyogianya berpengaruh positif terhadap perkembangan industri bank syariah. Dengan semakin mudahnya masyarakat mendapatkan akses layanan perbankan syariah, diperkirakan perubahan kinerja juga akan terjadi pada bank-bank yang menerapkan sistem *office channeling* ini.

Namun, penilaian kinerja menjadi semakin sulit dari waktu ke waktu karena berbagai sebab. Ekonomi domestik dan dunia lebih stabil pada masa lalu, siklus hidup produk lebih bertahan lama, perkembangan teknologi lebih lambat, perubahan lebih jarang terjadi, pesaing lebih sedikit, dan masih banyak industri yang diatur oleh pemerintah. Menurut David (2006) alasan mengapa penilaian kinerja sulit untuk dilakukan pada saat ini adalah adanya tren berikut ini:

1. Peningkatan yang dramatis dalam kompleksitas lingkungan
2. Makin cepatnya sebuah rencana yang bagus menjadi tidak relevan dan usang
3. Meningkatnya jumlah kejadian domestik dan dunia yang mempengaruhi organisasi

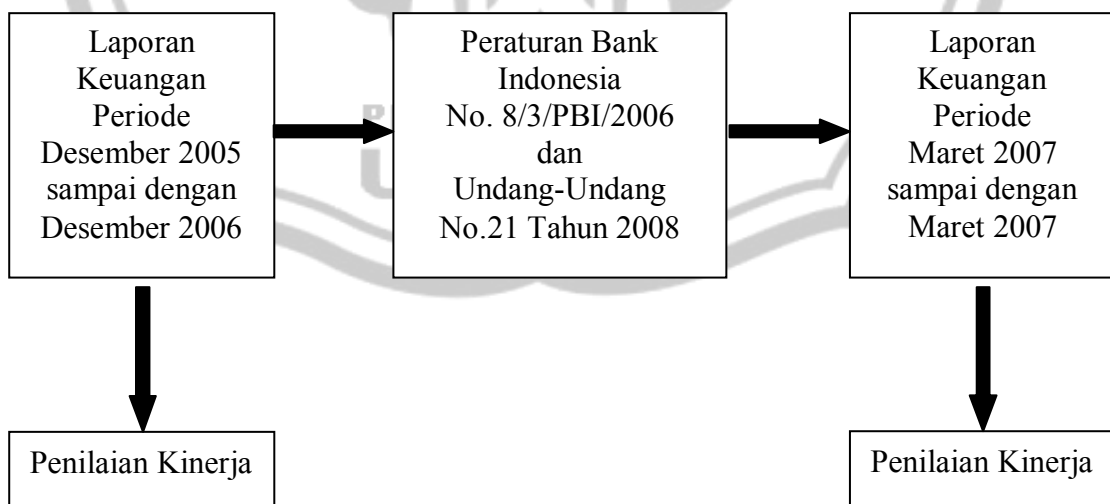
4. Makin pendeknya batas waktu suatu perencanaan bisa dilakukan, ditambah berbagai ketidakpastian yang menyertainya

Alasan-alasan tersebut di atas membuktikan bahwa perubahan faktor-faktor eksternal akan mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan. Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan batasan kebijakan Pemerintah sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan.

Maka, dapat disimpulkan bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, akan mempengaruhi kinerja perbankan syariah di Indonesia.

Untuk memperjelas arah pembahasan masalah yang diselidiki maka kerangka berpikir dapat terlihat pada gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



2.6. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang ditemukan dalam masalah yang diteliti yang harus dibuktikan kebenarannya. Menurut Sekaran (2006) hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam pernyataan yang dapat diuji. Hipotesis penelitian ini adalah :

1. Ha1 : Terdapat perbedaan signifikan dalam aspek kualitas manajemen sebelum dan sesudah penerapan kebijakan *office channeling*.
2. Ha2 : Terdapat perbedaan signifikan dalam aspek rentabilitas atau *earning* sebelum dan sesudah penerapan kebijakan *office channeling*.
3. Ha3 : Terdapat perbedaan signifikan dalam aspek likuiditas sebelum dan sesudah penerapan kebijakan *office channeling*.

Dalam penelitian ini, tidak semua aspek *CAMELS* dapat diukur karena beberapa sebab. Pada aspek *capital* atau permodalan tidak dapat dihitung karena modal pada Unit Usaha Syariah bergabung pada modal bank konvensional. Sementara pada aspek kualitas asset tidak dapat dihitung karena beberapa indikator pembentuk rasio kualitas *asset* tidak tercantum dalam laporan keuangan pada Unit Usaha Syariah seperti perincian pembiayaan. Sedangkan pada aspek sensitivitas atas risiko pasar tidak dapat dihitung dikarenakan indikator pembentuk rasionya yakni eksek modal tidak dimiliki oleh Unit Usaha Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Desain Penelitian

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis perbandingan data kuantitatif berupa angka-angka rasio keuangan yang diperoleh dan diuraikan sesuai masalah. Penelitian ini akan menganalisa pengaruh penerapan kebijakan *office channeling* terhadap kinerja perbankan syariah. Kinerja yang akan diteliti adalah kinerja dengan rasio *CAMELS* (*Capital, Assets Quality, Menegement Quality, Earning, Liquidity, Sensitivity to Market Risk*). Namun dalam kenyataan di lapangan beberapa aspek yakni *capital, assets* dan *sensitivity to market risk* tidak dapat dihitung rasionya dikarenakan ketidaksesuaian teori dengan praktik di lapangan yang ada. Seperti pada aspek *capital* tidak dapat dihitung karena modal pada Unit Usaha Syariah bergabung pada modal bank konvensional. Sementara pada aspek *assets* tidak dapat dihitung karena beberapa indikator pembentuk rasio kualitas *assets* tidak tercantum dalam laporan keuangan pada Unit Usaha Syariah seperti perincian pembiayaan. Sedangkan pada aspek *sensitivity to market risk* tidak dapat dihitung dikarenakan indikator pembentuk rasioanya yakni ekse modal tidak dimiliki oleh Unit Usaha Syariah.

3.2. Populasi dan Sampel

Sugiyono (2005) mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan baik yang menjalankan sistem *office channeling* maupun yang tidak menjalankan sistem *office channeling*.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2005). Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah Unit Usaha Syariah yang menjalankan sistem *office channeling* yang masing-masing beroperasi dari periode Desember 2005 sampai periode Maret 2008 yakni, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Bukopin, Bank CIMB Niaga, Bank DKI, Bank BPD Aceh, Bank BPD Jawa Barat dan Banten, serta Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kriteria dalam pengambilan objek penelitian ini adalah:

1. Perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia
2. Unit Usaha Syariah yang menerapkan sistem *office channeling*
3. Unit Usaha Syariah yang menerapkan sistem *office channeling* yang beroperasi dari periode Desember 2005 sampai dengan Maret 2008, terdapat 6 Unit Usaha Syariah, yakni Unit Usaha Syariah Bank Bukopin, Bank CIMB Niaga, Bank DKI, Bank BPD Aceh, BPD Jawa Barat dan Banten, serta Bank Rakyat Indonesia (BRI).

3.3. Variabel

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai (Sekaran 2006). Variabel dari penelitian ini adalah variabel-variabel

independen yang berupa rasio-rasio keuangan sebelum dan setelah diterapkannya sistem *office channeling* yang terdiri dari rasio kualitas manajemen yaitu NPM, rasio rentabilitas yaitu ROA dan REO serta rasio likuiditas yaitu RABP. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala rasio.

1. Aspek Kualitas Manajemen yang diukur dengan NPM. NPM (*Net Profit Margin*) adalah rasio untuk mengetahui kinerja manajemen suatu bank. Aspek manajemen pada penelian kinerja bank tidak dapat menggunakan pola yang ditetapkan Bank Indonesia, tetapi diproksikan dengan *profit margin* (Riyadi dalam Merkusiwati 2007). Alasannya, seluruh kegiatan manajemen suatu bank yang mencakup manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas pada akhirnya akan mempengaruhi dan bermuara pada perolehan laba. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Pendapatan operasional}} \times 100\%$$

2. Aspek Rentabilitas atau *earning* yang diukur dengan ROA dan REO.

ROA (Return On Assets) adalah rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba. Rasio ini dapat dirumuskan Sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

REO (Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional) adalah rasio untuk mengukur efisiensi kegiatan operasional bank. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{REO} = \frac{\text{Beban operasional}}{\text{Pendapatan operasional}} \times 100\%$$

3. Aspek likuiditas yang diukur dengan RABP. RABP (Rasio Antar Bank Pasiva) adalah rasio untuk mengukur tingkat ketergantungan bank terhadap dana antar bank. rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{RABP} = \frac{\text{Antar bank pasiva}}{\text{Total kewajiban}} \times 100\%$$

3.4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel atau diagram. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi laporan keuangan triwulan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Bukopin, Bank CIMB Niaga, Bank DKI, Bank BPD Aceh, Bank BPD Jawa Barat dan Banten, serta Bank Rakyat Indonesia (BRI). Jenis masing-masing laporan keuangan yang digunakan terdiri dari :

1. Neraca triwulan : periode Desember 2005, periode Maret 2006, periode Juni 2006, periode September 2006, periode Desember 2006, periode Maret 2007,

periode Juni 2007, periode September 2007, periode Desember 2007, dan periode Maret 2008.

2. Laporan laba rugi triwulan : periode Desember 2005, periode Maret 2006, periode Juni 2006, periode September 2006, periode Desember 2006, periode Maret 2007, periode Juni 2007, periode September 2007, periode Desember 2007, dan periode Maret 2008.

Sedangkan patokan pemberlakuan *office channeling* pada masing-masing bank adalah 1 Januari 2007.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dal penelitian ini adalah dokumentasi yang merupakan proses mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumen-dokumen tersebut adalah laporan keuangan triwulan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Bukopin, Bank CIMB Niaga, Bank DKI, Bank BPD Aceh, Bank BPD Jawa Barat dan Banten, serta Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dokumen ini didapatkan oleh peneliti pada publikasi laporan keuangan Unit Usaha Syariah di *official website* Bank Indonesia, www.bi.go.id.

3.6. Teknik Pengolahan Data

Data-data diambil dari laporan keuangan untuk kemudian dihitung rasio-rasio keuangan sebagai variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini

berdasarkan dari laporan keuangan tersebut. Adapun rasio yang menjadi variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. ROA (*Return ON Assets*)
2. REO (Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional)
3. NPM (*Net Profit Margin*)
4. RABP (Rasio Antar Bank Pasiva)

Dalam penelitian ini akan dilakukan beberapa pengujian untuk memperoleh hasil penelitian dan kesimpulan. Adapun pengujian yang akan dilakukan antara lain:

1. Pengujian normalitas data

Uji normalitas distribusi data dilakukan setelah perhitungan kinerja-kinerja keuangan dengan rasio yang akan menjadi variabel dalam penelitian ini. Normalitas data diuji dengan menggunakan *Shapiro-Wilk Test*. Data dikatakan normal atau tidak normal, didasarkan pada tingkat signifikansi α sebesar 5%. Data dikatakan normal apabila P value lebih besar dari 0,05, sedangkan P value yang lebih kecil dari 0,05 maka data dikatakan tidak normal.

2. Pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat ditentukan dengan uji beda. Indikator penerimaan atau penolakan H_a , didasarkan pada tingkat signifikansi α sebesar 5%. H_a ditolak apabila P value lebih besar dari 0,05, sedangkan P value lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima.

Nilai t-statistik untuk sample t-test uji beda dua rata-rata masing-masing sebelum penerapan sistem *office channeling* yakni periode Desember 2005

sampai dengan Desember 2006 dan setelah penerapan sistem *office channeling* yakni periode Maret 2007 sampai dengan Maret 2008:

$$Z_0 = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

Keterangan:

X_1 = Rata-rata NPM atau ROA atau REO atau RABP sebelum *office channeling*

X_2 = Rata-rata NPM atau ROA atau REO atau RABP setelah *office channeling*

σ_1^2 = Varian NPM atau ROA atau REO atau RABP sebelum *office channeling*

σ_2^2 = Varian NPM atau ROA atau REO atau RABP setelah *office channeling*

n_1 = Jumlah sampel sebelum *office channeling*

n_2 = Jumlah sampel setelah *office channeling*

Alat uji beda yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Paired Sample T-test* untuk data normal dan *Wilcoxon Signed Rank Test* untuk data tidak normal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Variabel

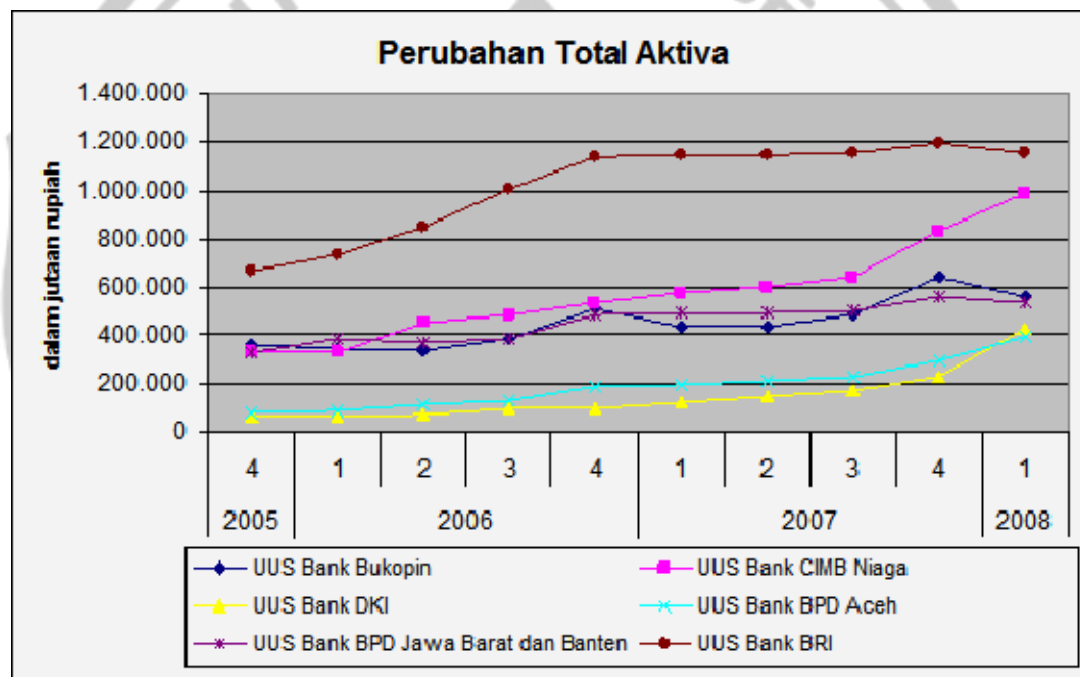
Penelitian ini merupakan penelitian yang mempergunakan variabel berupa rasio-rasio keuangan yang terbagi menjadi 3 aspek yaitu aspek kualitas manajemen, aspek rentabilitas, dan aspek likuiditas.

Aspek kualitas manajemen yang diwakili dengan NPM dapat dihitung dengan membagi laba bersih dengan pendapatan operasional dikali seratus persen. Sementara itu, ROA dan REO yang mewakili dari aspek rentabilitas masing-masing dapat dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan total aktiva dikali seratus persen untuk ROA serta beban operasional dibagi pendapatan operasional dikali seratus persen untuk REO. Sedangkan untuk aspek likuiditas yang diwakili oleh RABP dapat dihitung dengan pembagian antara antar bank pasiva dan total kewajiban dikali seratus persen. Berikut ini adalah kondisi masing-masing item yang membentuk rasio-rasio keuangan pada sampel penelitian yaitu pada Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Bukopin, Bank CIMB Niaga, Bank DKI, Bank BPD Aceh, Bank BPD Jawa Barat dan Banten, serta Bank Rakyat Indonesia (BRI) beserta perubahannya antara sebelum dan setelah penerapan kebijakan *office channeling* secara keseluruhan.

4.1.1.1. Total Aktiva

Total aktiva terdiri dari kas, giro Bank Indonesia, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, penempatan pada bank lain beserta penyusutannya, surat berharga yang dimiliki beserta penyusutannya, piutang murabaha beserta penyusutannya, piutang lainnya beserta penyusutannya, pembiayaan mudharabah dan musyarakah beserta penyusutannya, pendapatan yang masih akan diterima, biaya dibayar dimuka, aktiva tetap beserta akumulasi penyusutannya dan aktiva lain-lain.

Gambar 4.1 Perubahan Total Aktiva



Dari jumlah total aktiva, akan diketahui seberapa besar dampak kebijakan sistem *office channeling* terhadap perubahan aset yang dimiliki bank khususnya pada pos piutang murabaha serta pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang menjadi salah satu fokus transaksi produk syariah pada Unit Usaha Syariah.

Hampir semua bank mengalami kenaikan total aktiva setelah penerapan kebijakan *office channeling*. Kenaikan yang cukup mencolok terjadi pada UUS Bank BRI.

Tabel 4.1 Perubahan Total Aktiva

Keterangan	Total Aktiva	
	Sebelum <i>Office Channeling</i>	Setelah <i>Office Channeling</i>
Σ	11.429.851.000.000	17.001.354.000.000
Max	1.138.623.000.000	1.191.354.000.000
Min	62.135.000.000	123.024.000.000
Range	1.076.488.000.000	1.068.330.000.000
n	30	30
Rata-rata	380.995.000.000	566.711.000.000

Sumber: Data yang telah diolah

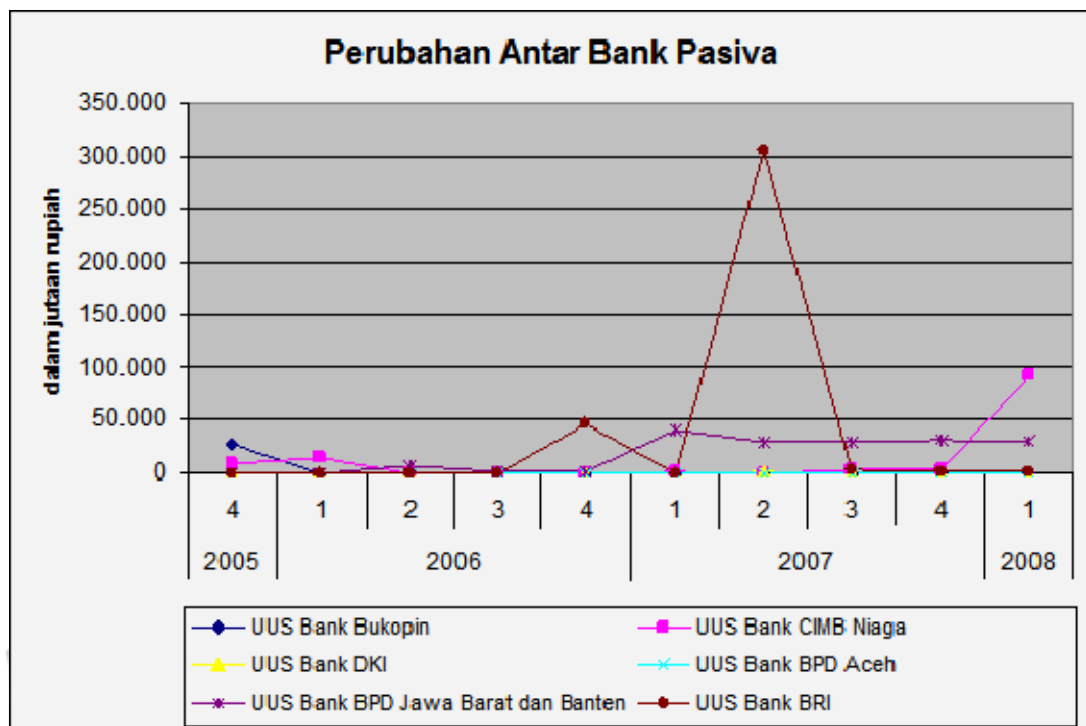
Rata-rata kenaikan total aktiva perbankan syariah antara sebelum dan setelah menerapkan sistem *office channeling* sebesar 48,74% atau tepatnya sebesar Rp 185.716.000.000,00. Salah satu penyebab kenaikan ini adalah meningkatnya jumlah nasabah yang menggunakan jasa perbankan syariah khususnya jasa penyaluran dana bank terhadap nasabah, seperti piutang murabaha dan pembiayaan mudharabah serta musyarakah.

4.1.1.2. Total Pasiva

Total pasiva terdiri dari dana simpana wadiah, kewajiban segera lainnya, kewajiban kepada Bank Indonesia, kewajiban kepada bank lain, surat berharga yang diterbitkan, kewajiban lain-lain, dana investasi tidak terikat dan saldo laba.

Besarnya total pasiva menunjukkan besarnya kewajiban bank (Unit Usaha Syariah) kepada pihak lain dan nasabah serta laba yang diperoleh pada periode berjalan. Modal tidak ikut diungkapkan dalam laporan keuangan Unit Usaha Syariah karena masih bergabung pada induk konvensional.

Gambar 4.2 Perubahan Antar Bank Pasiva



Penerapan kebijakan *office channelling* pada perbankan syariah mau tidak mau telah mempengaruhi perubahan jumlah total pasiva pada setiap bank yang menjalankan sistem ini. Perubahan yang mencolok terjadi pada perubahan antar pasiva bank yang merupakan tolak ukur likuiditas bank tersebut.

Masing-masing bank mengalami perubahan yang berbeda-beda pada bagian antar bank pasiva antara sebelum dan setelah penerapan kebijakan sistem *office channeling*. Namun hampir semua bank mengalami peningkatan antar bank pasiva setelah penerapan kebijakan sistem *office channeling*. Meskipun hal ini tidak terjadi pada Bank BPD Aceh yang tetap mempertahankan nilai Rp 0,00 pada aspek ini.

Tabel 4.2 Perubahan Antar Bank Pasiva

Keterangan	Antar Bank Pasiva	
	Sebelum <i>Office Channeling</i>	Setelah <i>Office Channeling</i>
Σ	115.272.000.000	581.361.000.000
Max	46.543.000.000	304.113.000.000
Min	0	0
Range	46.543.000.000	304.113.000.000
n	30	30
Rata-rata	3.842.000.000	19.379.000.000

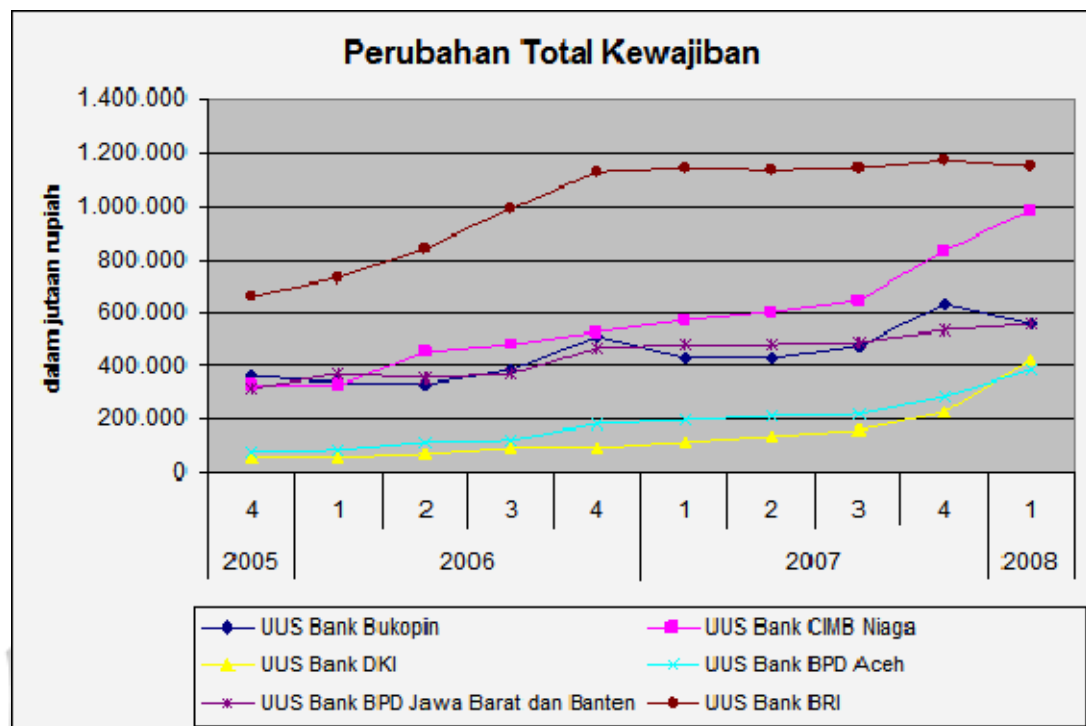
Sumber: Data yang telah diolah

Rata-rata kenaikan antar bank pasiva antara sebelum dan setelah *office channeling* sangatlah tinggi, yakni 404,40% yang senilai dengan Rp 15.537.000.000,00. Sebelum penerapan *office channeling*, rata-rata antar bank pasiva perbankan syariah mencapai Rp 3.842.000.000,00 dan angka ini meningkat menjadi Rp 19.379.000.000,00 atau 3,46% dari rata-rata total kewajiban setelah penerapan *office channeling*.

Kenaikan luar biasa yang terjadi pada antar bank pasiva mau tidak mau akan menaikkan pula total kewajiban bank tersebut.

Total kewajiban yang terdiri dari dana simpanan wadiah, kewajiban segera lainnya, kewajiban kepada Bank Indonesia, kewajiban kepada bank lain, surat berharga yang diterbitkan, kewajiban lain-lain serta dana investasi tidak terikat.

Gambar 4.3 Perubahan Total Kewajiban



Penerapan kebijakan *office channeling* telah mempengaruhi perubahan total kewajiban bank (Unit Usaha Syariah) yang menerapkannya. Terfokus pada dana simpanan wadiah dan dana investasi tidak terikat yang terdiri dari tabungan dan deposito mudharabah sebagai produk layanan bank syariah itu sendiri.

Tabel 4.3 Perubahan Total Kewajiban

Keterangan	Total Kewajiban	
	Sebelum <i>Office Channeling</i>	Setelah <i>Office Channeling</i>
Σ	11.282.538.000.000	16.808.637.000.000
Max	1.121.303.000.000	1.171.755.000.000
Min	59.669.000.000	115.680.000.000
Range	1.061.634.000.000	1.056.075.000.000
n	30	30
Rata-rata	376.085.000.000	560.288.000.000

Sumber: Data yang telah diolah

Rata-rata total kewajiban perbankan syariah sebelum penerapan *office channeling* dihitung sebesar Rp 376.085.000.000,00 dan setelah penerapan *office channeling* rata-rata total kewajiban perbankan syariah naik sebesar 32,88% menjadi Rp 560.288.000.000,00.

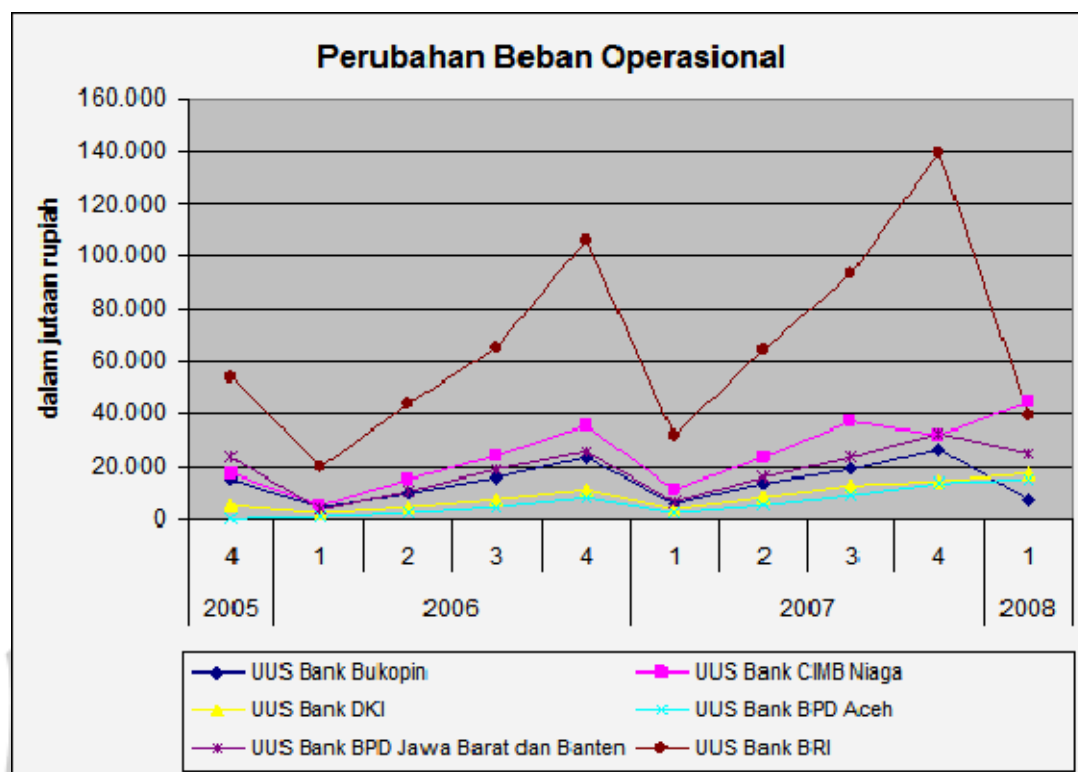
4.1.1.3. Beban Operasional

Salah satu keuntungan *office channeling* adalah penghematan biaya pada UUS, seperti penghematan sumber daya manusia. Dengan adanya *office channeling*, UUS tidak perlu lagi merekrut karyawan untuk melayani produk syariahnya. Cukup dengan karyawan pada bank konvensional, UUS dapat tetap melayani nasabah yang ingin menggunakan produk jasa syariah bank yang bersangkutan.

Beban operasional pada Unit Usaha Syariah terdiri dari bonus wadiah, penyisihan penghapusan aktiva produktif, beban administrasi dan umum, beban personalia serta beban lainnya yang bersangkutan dengan proses produksi.

Dari perubahan yang terjadi pada beban operasional, dapat diketahui seberapa besar dampak penerapan *office channeling* terhadap penghematan beban operasional bank khususnya pada beban personalia.

Gambar 4.4 Perubahan Beban Operasional



Namun, pada kenyataannya hal itu tidak sepenuhnya terjadi pada perbankan syariah setelah penerapan kebijakan *office channeling*. Hampir semua bank mengalami gerak fluktuatif yang sama pada beban operasionalnya, yakni meningkat pesat pada akhir tahun.

Tabel 4.4 Perubahan Beban Personalia

Keterangan	Beban Personalia	
	Sebelum <i>Office Channeling</i>	Setelah <i>Office Channeling</i>
Σ	207.336.000.000	273.642.000.000
Max	38.455.000.000	47.967.000.000
Min	324	973
Range	38.131.000.000	46.994.000.000
n	30	30
Rata-rata	6.911.200.000	9.121.400.000

Sumber: Data yang telah diolah

Rata-rata beban personalia yang menjadi fokus dari penerapan sistem *office channeling* justru mengalami peningkatan dari Rp 6.911.200.000,00 sebelum penerapan *office channeling* menjadi Rp 9.121.400.000,00 setelah penerapan *office channeling* atau sebesar 31,98%.

Peningkatan beban personalia secara otomatis akan meningkatkan pula total beban operasionalnya. *Office channeling* yang diharapkan akan meminimalkan beban operasional tidak sepenuhnya berhasil dengan adanya peningkatan ini.

Tabel 4.5 Perubahan Beban Operasional

Keterangan	Beban Operasional	
	Sebelum <i>Office Channeling</i>	Setelah <i>Office Channeling</i>
Σ	569.007.000.000	777.738.000.000
Max	105.952.000.000	139.303.000.000
Min	273.000.000	1.966.000.000
Range	105.679.000.000	137.337.000.000
n	30	30
Rata-rata	18.967.000.000	25.925.000.000

Sumber: Data yang telah diolah

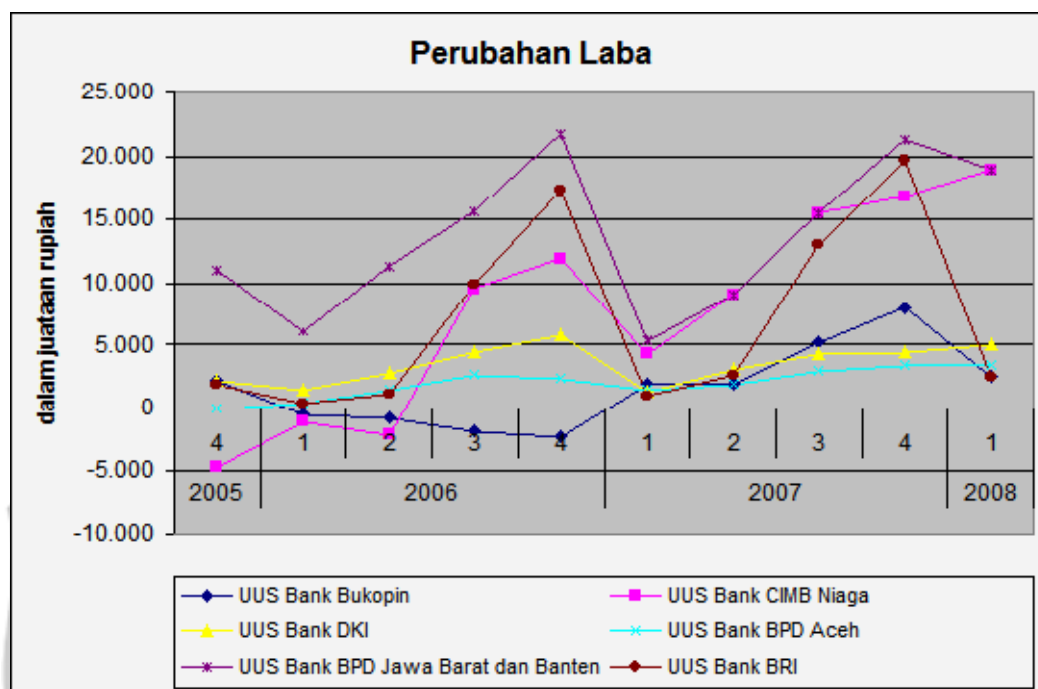
Rata-rata peningkatan beban operasional perbankan syariah setelah diterapkannya *office channeling* serhitung sebesar Rp 6.958.000.000,00. Sebelum *office channeling*, rata-rata beban operasional tercatat sebesar Rp 18.967.000.000,00 dan setelah diterapkannya *office channeling*, rata-rata beban operasional perbankan syariah naik sebesar 36,68% menjadi Rp 25.925.000.000,00.

4.1.1.4.Laba

Laba adalah keuntungan yang diterima oleh bank dari pendapatan operasional yang dikurangi bagi hasil untuk investor dana investasi tidak terikat

dan beban operasional yang kemudian ditambahkan dengan laba (rugi) non operasional bersih.

Gambar 4.6 Perubahan Laba



Jika dibandingkan dengan rata-rata beban operasional, rata-rata laba perbankan syariah lebih kecil daripada beban operasionalnya. Hal ini berarti, pendapatan operasional bank masih banyak terbuang di beban operasional dibandingkan yang masuk ke kantong bank sebagai laba.

Tabel 4.6 Perubahan Laba

Keterangan	Laba	
	Sebelum <i>Office Channeling</i>	Setelah <i>Office Channeling</i>
Σ	130.588.000.000	224.112.000.000
Max	21.689.000.000	21.272.000.000
Min	-4.594.000.000	959.000.000
Range	26.283.000.000	20.313.000.000
n	30	30
Rata-rata	4.353.000.000	7.470.000.000

Sumber: Data yang telah diolah

Namun, jika dibandingkan antar skala peningkatan antara sebelum dan setelah penerapan *office channeling*, rata-rata beban operasional mengalami peningkatan sebesar 36,68% sedangkan rata-rata laba mengalami peningkatan sebesar 71,61%. Ini berarti, meski rata-rata laba yang diperoleh bank berjumlah kecil dibandingkan dengan rata-rata beban operasionalnya, namun peningkatan rata-rata laba lebih besar dibandingkan dengan peningkatan rata-rata beban operasionalnya.

Tidak berhenti pada perhitungan naiknya total aktiva, total kewajiban, total pasiva antar bank, total beban operasional serta total laba saja. Perhitungan variabel-variabel penilaian kinerja seperti NPM, ROA, REO dan RABP juga menunjukkan perubahan setelah diterapkannya kebijakan *office channeling* pada perbankan syariah. Umumnya variabel-variabel ini mengalami peningkatan meski hal ini tidak berlaku pada ROA. NPM, REO dan RABP masing-masing mengalami rata-rata peningkatan sebesar 3,83%, 4,5% dan 1,64%. Sedangkan ROA mengalami rata-rata penurunan sebesar 0,1%.

Tabel 4.7 Perubahan NPM (dalam persen)

Keterangan	NPM	
	Sebelum <i>Office Channeling</i>	Setelah <i>Office Channeling</i>
Σ	658,96	774,04
Max	71,63	45,33
Min	-26,99	2,92
Range	98,62	42,41
n	30	30
Rata-rata	21,96	25,80

Sumber: Data yang telah diolah

Peningkatan pada NPM memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja perbankan syariah. Bila NPM bergerak naik, maka yang terjadi adalah peningkatan pemasukan pada perbankan syariah. Sebelum penerapan *office channeling*, rata-rata NPM perbankan syariah sebesar 21,96% dan meningkat menjadi 25,80% setelah penerapan kebijakan *office channeling*.

Tabel 4.8 Perubahan ROA dan REO (dalam persen)

Keterangan	ROA		REO	
	Sebelum <i>Office Channeling</i>	Sebelum <i>Office Channeling</i>	Sebelum <i>Office Channeling</i>	Setelah <i>Office Channeling</i>
Σ	45,56	42,55	2.007,23	2.142,28
Max	5,59	3,83	101,17	97,38
Min	-1,40	0,08	10,95	55,23
Range	6,99	3,74	90,22	42,15
n	30	30	30	30
Rata-rata	1,52	1,42	66,91	71,41

Sumber: Data yang telah diolah

Penurunan pada ROA dan peningkatan pada REO antara sebelum dan setelah diterapkannya *office channeling* dapat diartikan bahwa terjadi penurunan kinerja pada aspek rentabilitas perbankan syariah.

Dalam lampiran Surat Edaran BI No.9/24/DPbS perihal Sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, telah ditetapkan kriteria penilaian peringkat ROA sebagai berikut :

- a. Peringkat 1 = $ROA > 1,5\%$
- b. Peringkat 2 = $1,25\% < ROA \leq 1,5\%$
- c. Peringkat 3 = $0,5\% < ROA \leq 1,25\%$
- d. Peringkat 4 = $0\% < ROA \leq 0,5\%$
- e. Peringkat 5 = $ROA \leq 0\%$

Berdasarkan kriteria tersebut, ROA perbankan syariah sebelum penerapan *office channeling* lebih baik dibandingkan ROA setelah penerapan *office channeling*.

Masih dalam lampiran yang sama, juga disebutkan kriteria penilaian peringkat REO oleh BI. Adapun kriteria penilaian peringkat REO adalah sebagai berikut :

- a. Peringkat 1 = $REO \leq 83\%$
- b. Peringkat 2 = $83\% < REO \leq 85\%$
- c. Peringkat 3 = $85\% < REO \leq 87\%$
- d. Peringkat 4 = $87\% < REO \leq 89\%$
- e. Peringkat 5 = $REO > 89\%$

Senada dengan perubahan pada ROA, berdasarkan kriteria di atas, REO perbankan syariah sebelum penerapan *office channeling* juga lebih baik dibandingkan REO setelah penerapan *office channeling*.

Tabel 4.9 Perubahan RABP (dalam persen)

Keterangan	RABP	
	Sebelum <i>Office Channeling</i>	Setelah <i>Office Channeling</i>
Σ	23,36	72,63
Max	7,90	26,80
Min	0	0
Range	7,90	26,80
n	30	30
Rata-rata	0,78	2,42

Sumber: Data yang telah diolah

Peningkatan RABP perbankan syariah setelah diterapkannya kebijakan *office channeling* dapat diartikan bahwa telah terjadi peningkatan ketergantungan bank syariah terhadap dana antar bank. Peningkatan ini dapat menurunkan kinerja

perbankan syariah bila dilihat dari aspek likuiditasnya karena bank syariah sangat tergantung pada dana pihak luar dibandingkan dengan dana yang dimilikinya sendiri.

4.1.2. Uji Hipotesis

Analisis awal yang dilakukan sebelum pengujian hipotesis adalah uji normalitas data. Dalam analisis ini digunakan uji *Shapiro-Wilk Test* dengan tingkat signifikansi yang digunakan $\alpha = 5\%$, jika P value $> 5\%$ maka data dianggap normal. Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jenis alat analisis yang digunakan untuk melakukan uji beda (non parametrik atau parametrik). Jika data tidak normal maka digunakan uji beda non parametrik dengan menggunakan *Wilcoxon Signed Rank Test* sebaliknya jika data normal digunakan *Paired Sample T-test*. Hal ini dikarenakan teknik statistik parametrik yang biasanya digunakan untuk menganalisis data dari dua sampel berhubungan atau berpasangan adalah uji beda rata-rata atau t-test. Menurut Ghazali (2002) uji-t mengasumsikan bahwa perbedaan skor secara independen didapat dari distribusi normal yang berarti pengukuran variabel paling tidak dengan skala interval. Kadang-kadang uji-t tidak tepat oleh karena asumsinya tidak terpenuhi atau peneliti menemukan kondisi sebagai berikut :

1. Asumsi uji-t tidak dapat dipenuhi
2. Perbedaan diantara dua pasangan tidak mencerminkan skor tetapi *sign* atau tanda
3. Skor yang akan diuji berupa klasifikasi

dalam kondisi seperti ini, maka statistik yang sesuai adalah statistik non-parametrik dengan kasus dua sampel berhubungan. Uji beda dilakukan untuk mengetahui rasio yang dapat membedakan kinerja bank syariah sebelum dan setelah diterapkannya kebijakan *office channeling*. Adapun hasil uji normalitas data masing-masing rasio disajikan pada tabel 4.10.

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas Data (*Shapiro-Wilk Test*)

Rasio	Signifikansi	Keterangan
NPM sebelum <i>office channeling</i>	0,321	Normal
NPM setelah <i>office channeling</i>	0,406	Normal
ROA sebelum <i>office channeling</i>	0,124	Normal
ROA setelah <i>office channlling</i>	0,054	Normal
REO sebelum <i>office channeling</i>	0,604	Normal
REO setelah <i>office channeling</i>	0,014	Tidak Normal
RABP sebelum <i>office channeling</i>	0,000	Tidak Normal
RABP setelah <i>office channeling</i>	0,000	Tidak Normal

Sumber: Data yang telah diolah

Berdasarkan Tabel 4.10 rasio REO dan RABP, dikatakan tidak normal karena dalam salah satu atau kedua kategorinya memiliki P value lebih kecil dari 0,05, untuk itu akan dilakukan uji hipotesis, yaitu uji beda dengan menggunakan *Wilcoxon Signed Rank Test*. Sedangkan untuk rasio ROA dan NPM berdistribusi normal karena memiliki P value lebih besar dari 0,05, maka akan dilakukan uji hipotesis, yaitu uji beda dengan menggunakan *Paired Sample T-test* untuk mengetahui apakah rasio-rasio tersebut memiliki perbedaan yang signifikan antar sebelum dan setelah diterapkannya kebijakan *office channeling* pada perbankan syariah.

Setelah uji normalitas dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah pengujian terhadap hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan sebagai upaya memperoleh gambaran mengenai suatu populasi dari sampel (Somantri 2006).

Dengan demikian, informasi yang diperoleh dari sampel digunakan untuk menyusun suatu pendugaan terhadap nilai parameter populasinya yang tidak diketahui. Dalam penelitian ini, alat uji hipotesis yang digunakan adalah uji beda *Wilcoxon Signed Rank Test* untuk data tidak normal, yakni rasio REO dan RABP sebaliknya uji beda *Paired Sample T-test* untuk data normal, yakni rasio ROA dan NPM. adapun hasil uji hipotesis masing-masing rasio disajikan pada tabel 4.11 sampai dengan table 4.13.

Tabel 4.11 Hasil Uji Beda pada Aspek Manajemen

Rasio	Signifikansi	Ha1
NPM	0,362	Ditolak

Sumber: Data yang telah diolah

Tabel 4.12 Hasil Uji Beda pada Aspek Rentabilitas (*Earning*)

Rasio	Signifikansi	Ha2
ROA	0,719	Ditolak
REO	0,178	Ditolak

Sumber: Data yang telah diolah

Tabel 4.13 Hasil Uji Beda pada Aspek Likuiditas

Rasio	Signifikansi	Ha3
RABP	0,046	Diterima

Sumber: Data yang telah diolah

4.2. Pembahasan

Hasil uji hipotesis 1 (H_{a1}) menyatakan bahwa tidak terjadi perbedaan yang signifikan pada aspek manajemen antara sebelum dan setelah diterapkannya kebijakan *office channeling* pada perbankan syariah. Hal ini dibuktikan dengan penolakan H_{a1} dengan signifikansi 0,362 yang lebih besar dari 0,05.

Tidak terjadinya perubahan ini disebabkan oleh kebijakan manajerial akan sosialisasi *office channeling* yang kurang maksimal. Penelitian ini mencatat bahwa jumlah piutang murabaha dan pembiayaan mudharabah serta musyarakah lebih besar dibanding investasi tidak terikat baik sebelum dan setelah penerapan *office channeling* pada perbankan syariah. Hal ini dapat berarti, masyarakat atau nasabah lebih tertarik untuk memakai produk penyaluran dana bank kepada nasabah dibandingkan dengan produk penghimpun dana nasabah oleh bank. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh pemberian informasi yang kurang kepada masyarakat oleh bank syariah dan BI. Masyarakat lebih memilih menggunakan produk penyaluran dana bank kepada nasabah karena proses dan nilai pengembaliannya yang jelas tanpa adanya bunga sehingga nasabah tidak merasa dirugikan bila terjadi lonjakan kenaikan suku bunga bank. Berbeda dengan pinjaman yang dirasa aman dan mudah, produk penghimpunan dana oleh bank kepada nasabah dirasa tidak aman dan rumit bagi nasabah bila bank kurang memberikan informasi kepada calon nasabah. Sistem bagi hasil membuat calon nasabah khawatir akan pengembalian dana investasi mereka yang dikelola oleh bank syariah. Mereka berfikir, bila terjadi kerugian pada sistem itu, maka mereka tidak akan mendapat keuntungan dari penanaman investasi mereka di bank syariah. Alih-alih mereka berfikir, uang mereka pun bisa habis karena usaha bagi hasil yang terus merugi.

Pemberian informasi yang minim dan tidak akurat menyebabkan tingginya jumlah piutang murabahah dan pembiayaan mudharabah serta musyarakah oleh bank syariah. Setelah *office channeling*, jumlah rata-rata piutang dan pembiayaan

tersebut sebesar Rp 412.514.300.000,00, angka ini naik sebesar 43,44% dari jumlah rata-rata sebelum *office channeling* sebesar Rp 287.591.200.000,00.

Tabel 4.14 Perubahan Piutang Murabaha dan Pembiayaan Mudharabah serta Musyarakah

Keterangan	Piutang Murabaha dan Pembiayaan Mudharabah serta Musyarakah	
	Sebelum <i>Office Channeling</i>	Setelah <i>Office Channeling</i>
Σ	8.627.736.000.000	12.375.430.000.000
Max	975.115.000.000	1.020.255.000.000
Min	21.681.000.000	55.863.000.000
Range	953.434.000.000	964.392
n	30	30
Rata-rata	287.591.200.000	412.514.300.000

Sumber: Data yang telah diolah

Sedangkan pada jumlah rata-rata dana wadiah dan investasi tidak terikat, peningkatannya sebesar 108,7% dari sebelum diterapkannya *office channeling* sebesar Rp 155.086.830.000,00 menjadi Rp 323.667.530.000,00 setelah *office channeling*. Peningkatan yang cukup tinggi meskipun nilainya masih dibawah jumlah rata-rata produk penyaluran dana oleh bank kepada nasabah.

Tabel 4.15 Perubahan Dana Wadiah dan Investasi Tidak Terikat

Keterangan	Dana Wadiah dan Investasi Tidak Terikat	
	Sebelum <i>Office Channeling</i>	Setelah <i>Office Channeling</i>
Σ	4.652.605.000.000	9.710.026.000.000
Max	397.434.000.000	751.141.000.000
Min	14.696.000.000	70.052.000.000
Range	382.738.000.000	681.089.000.000
n	30	30
Rata-rata	155.086.830.000	323.667.530.000

Sumber: Data yang telah diolah

Pada aspek rentabilitas juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah diterapkannya kebijakan *office channeling*. Dibuktikan

dengan hasil uji hipotesis yang menyatakan penolakan H_{a2} dengan masing-masing signifikansi 0,719 pada ROA dan 0,178 pada REO.

Keuntungan yang diperoleh UUS dengan adanya *office channeling* adalah biaya lebih murah dan mampu menjaring dana-dana potensial di seluruh kantor cabang bank konvensional. Namun, kemungkinan bahwa *office channeling* belum optimal dalam prakteknya harus juga diakui. Hal ini dikarenakan kesiapan sumber daya manusia yang belum memadai turut mempengaruhi optimalisasi operasi *office channeling* ini. Dengan maksud menghemat beban personalia nyatanya justru memperbesar total beban operasional karena kurangnya pemahaman sumber daya manusia yang dimiliki bank konvensional tentang produk bank syariah. Keadaan ini memaksa bank untuk menambah jumlah personil yang paham tentang produk bank syariah.

Ketidaknyamanan nasabah akan pemberian informasi yang kurang oleh pihak bank menjadikan calon nasabah kurang tertarik menggunakan jasa perbankan syariah. Hal ini mempengaruhi pendapatan laba bank yang tak kunjung berubah baik sebelum dan setelah *office channeling* dan akhirnya berdampak pula pada rasio pengembalian aset (ROA) bank yang bersangkutan.

Kurangnya sosialisasi dan pemahaman sumber daya manusia yang dimiliki bank konvensional yang meneparkan sistem *office channeling* agaknya menjadi momok yang paling nyata mengapa penerapan sistem ini tidak membawa perubahan yang signifikan pada perbankan syariah.

Perbedaan yang signifikan hanya terjadi pada aspek likuiditas yang diwakili oleh RABP dengan penerimaan Ha3 dan signifikansi sebesar 0,046.

Dalam penelitian ini RABP (Rasio Antar Bank Pasiva) sebagai rasio aspek likuiditas menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan bank terhadap dana antar bank mengalami perubahan semenjak diterapkannya kebijakan *office channeling* pada perbankan syariah. Perubahan itu menunjukkan peningkatan RABP yang berarti kinerja perbankan syariah dari aspek likuiditas justru mengalami penurunan.

Beberapa pakar ekonomi menyimpulkan bahwa setelah penerapan *office channeling*, kinerja perbankan syariah semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan perbankan syariah yang sangat mengembirakan. Sasmitasiwi dan Cahyadin (2007) mengemukakan bahwa “dengan aturan *office channeling*, transaksi syariah bisa dilakukan di cabang bank konvensional. Aturan ini tentu bisa memperluas jaringan layanan perbankan syariah dengan cepat dengan ongkos yang murah, sehingga pangsa perbankan syariah pada akhir tahun 2007 mencapai 3,5%.”

Senada dengan Sasmitasiwi dan Cahyadin, Zuhdi (2008) menyatakan bahwa “strategi menumbuhkan perbankan syariah melalui *office channeling* sangat berhasil. Jadi DPK perbankan syariah dengan kontribusi *office channeling* itu menjadi tumbuh 84% di 2007 dari pertumbuhan rata-rata 3 tahun terakhir adalah 59,6%.”

Namun pada penelitian ini, keberhasilan itu nyatanya belum bisa dikatakan sempurna. Dari hasil penelitian ini, bisa dikatakan bahwa kinerja perbankan syariah cenderung belum mengalami perbedaan yang signifikan dari sebelum dan setelah diterapkannya kebijakan *office channeling*.

Hasil penelitian ini sepaham dengan Wijaya (2008) yang menyatakan bahwa "berbagai kebijakan yang diprediksi akan mendorong pengembangan perbankan syariah seperti kebijakan *office channelling*, kebijakan sosialisasi akselerasi perbankan syariah, penurunan BI rate, ternyata belum memberikan hasil yang sesuai dengan harapan terkait dengan pengembangan perbankan syariah." serta Agustianto (2008) yang menyatakah bahwa:

Kebijakan *office channelling* tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan industri perbankan syariah, tanpa diawali dan dibarengi dengan upaya edukasi masyarakat tentang konsep operasional bank syariah dan keunggulannya Selain persoalan edukasi dan sosialisasi, masalah yang harus diperhatikan pelaku perbankan adalah masalah keterampilan SDM di bank konvensional yang membuka *office channeling*. *Coorporate culture* bank syariah juga harus menjadi perhatian praktisi perbankan yang membuka sistem *office channelling* ini.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil perhitungan dan pembahasan yang dilakukan menggunakan uji beda *Wilcoxon Signed Rank Test* dan *Paired Sample T-test*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak ada perbedaan yang signifikan pada aspek kualitas manajemen antara sebelum dan sesudah penerapan kebijakan *office channeling*. Hal ini ditunjukkan dengan pengujian NPM sebagai rasio aspek kualitas manajemen dengan menggunakan *Paired Sample T-test* yang menghasilkan signifikansi sebesar 0,362.
2. Tidak ada perbedaan yang signifikan pada aspek rentabilitas atau *earning* antara sebelum dan sesudah penerapan kebijakan *office channeling*. Hal ini ditunjukkan dengan pengujian ROA dan REO sebagai rasio aspek rentabilitas dengan masing-masing menggunakan *Paired Sample T-test* dan *Wilcoxon Signed Rank Test* yang menghasilkan signifikansi sebesar 0,719 untuk ROA dan 0,178 untuk REO.
3. Ada perbedaan yang signifikan pada aspek likuiditas antara sebelum dan sesudah penerapan kebijakan *office channeling*. Hal ini ditunjukkan dengan pengujian RABP sebagai rasio aspek likuiditas dengan menggunakan *Wilcoxon Signed Rank Test* yang menghasilkan signifikansi sebesar 0,046.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dari tiga aspek kinerja yang diteliti, dua diantaranya memiliki jawaban yang tidak signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan kebijakan *office channeling*. Hal ini bisa menjadi permasalahan yang perlu diwaspadai. Apakah penerapan kebijakan *office channeling* sudah efektif, ada baiknya Bank Indonesia sebagai penetap peraturan ini meninjau kembali PBI No.8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.
2. Tidak adanya perbedaan yang signifikan terhadap beberapa aspek kinerja perbankan syariah antara sebelum dan setelah diterapkannya kebijakan sistem *office channeling* disebabkan sumber daya manusia yang belum memadai, dan kurangnya pemahaman masyarakat atas keberadaan *office channeling* di kantor cabang bank konvensional. Oleh karena itu, perbaikan dan peningkatan sumber daya manusia khususnya pemahaman tentang perbankan syariah harus terus dilakukan oleh bank-bank konvensional yang menerapkan sistem *office channeling* serta bersama Bank Indonesia untuk lebih gencar mempromosikan keunggulan produk perbankan syariah kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 1998. **Al-Qur'an dan Terjemahannya**. Semarang: Karya Toha Putra.
- Achmad, Fahmi. 2007. **Aspek Manajemen Bank Syariah Jadi Penilaian BI**. Dalam **Bisnis Indonesia Online**. 30 Januari Hal 11. (3 September 2008).
- Bank IFI. **Profil Bank IFI Syariah**. 2008. Dalam www.bankifi.co.id. (3 September 2008).
- Bank Indonesia. 2004. **Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah**.
- Bank Indonesia. 2004. **Surat Edaran Nomor 6/23/DPNP perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang Melaksanakan Usaha Secara Konvensional**.
- Bank Indonesia. 2005. **Publikasi Laporan Keuangan Unit Usaha Syariah**. Dalam www.bi.go.id. (12 Januari 2009).
- Bank Indonesia. 2006. **Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional**.
- Bank Indonesia. 2006. **Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/26/DPbS tentang Perubahan Kegiatan Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional**.
- Bank Indonesia. 2006. **Publikasi Laporan Keuangan Unit Usaha Syariah**. Dalam www.bi.go.id. (12 Januari 2009).
- Bank Indonesia. 2007. **Publikasi Laporan Keuangan Unit Usaha Syariah**. Dalam www.bi.go.id. (12 Januari 2009).

- Bank Indonesia. 2007. **Surat Edaran Nomor 9/24/DPbS perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.**
- Bank Indonesia. 2008. **Kodifikasi Produk Perbankan Syariah.**
- Bank Indonesia. 2008. **Publikasi Laporan Keuangan Unit Usaha Syariah.** Dalam www.bi.go.id. (12 Januari 2009).
- David, Fred R. 2006. **Strategic Management: Concept (10th ed).** New York: Wiley.
- Djawahir, Kusnan M. 2005. **Kinerja Perbankan Syariah Indonesia di Tingkat Global.** Dalam Majalah SWA Online Edisi 17 Tahun ke 21. Hal. 98. (3 September 2008).
- Estetika Edit, 2008. **Office Channelling, Hypermarket Keuangan Produk Investasi dan Produk Generik.** Dalam Kantor Berita Ekonomi Syariah www.pkesinteraktif.com Generated 13 Oktober 2008. (3 September 2008).
- Ghozali, Imam dan N. John Castellan. 2002. **Statistik Non-Parametrik: Teori dan Aplikasi dengan Program SPSS.** Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gomes. 2003. **Manajemen Sumber Daya manusia.** Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamid, Aziz. 2006. **RUU Perbankan Syariah : Dibutuhkan Keberpihakan untuk Pengembangan Bank Syariah.** www.icmi.or.id/ind. (3 September 2008).
- Hasan, Zubairi. 2008. **Office Channeling dalam Perbankan Syariah.** www.bankbtn.co.id. (3 September 2008).
- Hunger, J. David dan Thomas L. Wheelen. 2003. **Manajemen Strategi.** Terjemahan Juliyanto Agung S. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. **Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif?.** Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kusumo, Yunanto Adi. 2008. **Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2002 – 2007 (dengan Pendekatan PBINo. 9/1/PBI/2007).** Dalam Jurnal Ekonomi Islam Laa Riba Volume II Nomor 1 Bulan Juli 2008. Hal.109-131. (3 September 2008).
- Merkusiwati, Ni Ketut Lely Aryani. 2007. **Evaluasi Pengaruh Camel Terhadap Kinerja Perusahaan.** Dalam Buletin Studi Ekonomi Volume 12 Nomor 1 Tahun 2007. Hal. 100-108. (3 September 2008).

- Mulyadi. 1997. **Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa: Edisi Kedua**. Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Prihandini, Septiana dan Toto Sugiharto. 2006. **Penilaian Kinerja Perusahaan dengan Metode Kartu Skor Keseimbangan pada PT. Sariwangi A. E. A.** Dalam Majalah Ekonomi dan Komputer No.2 Tahun ke 14. Hal. 83-96. (3 September 2008).
- Putri, Vicky Rahma dan Niki Lukviarman. 2008. **Pengukuran Kinerja Bank Komersial dengan Pendekatan Efisiensi: Studi Terhadap Perbankan Go Public di Indonesia**. Dalam JAAI Volume 12 No. 1 Hal. 37-52. (12 Januari 2009).
- Santosa, Purbayu Budi dan Ashari. 2005. **Analisis Statistik dengan Microsoft Excel dan SPSS**. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sasmitasiwi, Banoon dan Malik Cahyadin. **Prediksi Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2008**. Dalam Simposium Riset Ekonomi III ISEI Cabang Surabaya pada tanggal 24 November 2007. (12 Januari 2009).
- Sekaran, Uma. 2006. **Metodologi Penelitian untuk Bisnis: Jilid 1**. Terjemahan Kwan Men Yon. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2006. **Metodologi Penelitian untuk Bisnis: Jilid 2**. Terjemahan Kwan Men Yon. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Somantri, Ating dan Sambas Ali. 2006. **Aplikasi Statistika Dalam Penelitian**. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Sudjana. 2005. **Metoda Statistika: Edisi 6**. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Sugiyono. 2005. **Statistik untuk Penelitian**. Bandung: Alfabeta.
- Syamhudi, Kholid. 2008. **Pertumbuhan Bank Syariah**. Dalam Majalah As-Sunnah Edisi Khusus 06-07 Tahun ke 7. September 2008. Hal. 30-32.
- Tokay. 2007. **Bank Syariah**. <http://tokay.blogspot.com/2007/11/30/bank-syariah/> (3 September 2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.**

Wijaya, Alfi. 2008. **Perbankan Syariah 2008: Evaluasi, Trend, dan Proyeksi**. Dalam KARIM Review Special Edition January 2008. (12 Januari 2009).

Wirnyaningsih, dkk. 2005. **Bank dan Asuransi Islam di Indonesia**. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Zuhdi, Ramzi A. 2008. **Office Channeling Dorong Pertumbuhan Bank Syariah**. Dalam Detik Finance Edisi Senin, 07-01-2008. (3 September 2008).

Lampiran 11. Uji Normalitas



LAMPIRAN



Lampiran 1. Laporan Keuangan Unit Usaha Syariah Bank Bukopin

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT BANK BUKOPIN JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770 Telp. 7989837-7988266			
Neraca Periode: Desember 2005 dan 2004			
	POS - POS	12-2005	12-2004
A.	AKTIVA		
1.	Kas	2,596	2,729
2.	Giro Bank Indonesia	9,984	9,137
3.	Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	20,900	6,000
4.	Penempatan Pada Bank Lain	339	562
5.	PPAP Penempatan Pada Bank Lain -/-	(4)	(7)
6.	Surat Berharga Yang Dimiliki	21,000	20,000
7.	PPAP Surat Berharga Yang Dimiliki -/-	(210)	(200)
8.	Piutang Murabaha	252,698	188,542
9.	PPAP Piutang Murabaha -/-	(3,462)	(2,579)
10.	Piutang Lainnya	42	85
11.	PPAP Piutang lainnya -/-	(1)	
12.	Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah	51,744	26,314
13.	PPAP Pembiayaan -/-	(559)	(179)
14.	Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	1,464	1,156
15.	Biaya Dibayar Dimuka	6,264	7,340
16.	Aktiva Tetap	5,839	5,316
17.	Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap -/-	(2,216)	(1,052)
18.	Aktiva Lain-lain	52	36
	JUMLAH AKTIVA	366,470	263,200
B.	PASIVA		
1.	Dana Simpanan Wadiah	51,912	25,761
2.	Kewajiban Segera Lainnya	1,645	1,305
3.	Kewajiban Kepada Bank Indonesia (FPJPS)		
4.	Kewajiban Kepada Bank Lain	28,764	10,392
5.	Surat Berharga Yang Diterbitkan	45,000	45,000
6.	Kewajiban Lain-lain	88,172	58,263
7.	Dana Investasi Tidak Terikat	148,749	118,788
	a. Tabungan Mudharabah		
	b. Deposito Mudharabah	148,749	118,788
	b.1. Rupiah	148,749	118,788
	b.2. Valuta Asing		
8.	Saldo Laba (Rugi)	2,228	3,691
	JUMLAH PASIVA	366,470	263,200

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
 PT BANK BUKOPIN
 JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770
 Telp. 7989837-7988266

Laba/Rugi
 Periode: Desember 2005 dan 2004

	POS - POS	12-2005	12-2004
A.	Pendapatan Operasional		
	1. Margin Murabahah	30,375	22,971
	2. Bagi Hasil Mudharabah	9,044	3,977
	3. Bonus	144	471
	4. Pendapatan Operasional Lainnya	2,340	2,004
B.	Jumlah Pendapatan Operasional	41,903	29,423
C.	Bagi Hasil untuk Investor Dana Investasi tdk terikat -/-		
	1. Bank	4,248	2,815
	2. Bukan Bank	14,736	8,350
	3. Bank Indonesia		
D.	Jumlah Distribusi Bagi Hasil	18,984	11,165
E.	Pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil untuk investor dana investasi tidak terikat	22,919	18,258
F.	Beban Operasional		
	1. Bonus Wadiah	412	230
	2. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	1,289	1,575
	3. Beban Administrasi & Umum	4,185	3,188
	4. Beban Personalia	6,256	3,953
	5. Beban Lainnya	2,965	2,476
G.	Jumlah Beban Operasional	15,107	11,422
H.	Pendapatan (Beban) Operasional Bersih	7,812	6,836
I.	Pendapatan Non Operasional	73	49
J.	Beban Non Operasional	5,657	3,194
K.	Laba (Rugi) Non Operasional Bersih	(5,584)	(3,145)
L.	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2,228	3,691

PERPUSTAKAAN
 UNNES

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
 PT BANK BUKOPIN
 JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770
 Telp. 7989837-7988266

Neraca
 Periode: Maret 2006 dan 2005

POS - POS	03-2006	03-2005
A. AKTIVA		
1. Kas	3,851	4,048
2. Giro Bank Indonesia	10,092	11,302
3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	11,300	11,700
4. Penempatan Pada Bank Lain	201	1,087
5. PPAP Penempatan Pada Bank Lain -/-	(6)	(11)
6. Surat Berharga Yang Dimiliki	39,200	23,000
7. PPAP Surat Berharga Yang Dimiliki -/-	(392)	(230)
8. Piutang Murabaha	219,154	179,294
9. PPAP Piutang Murabaha -/-	(3,936)	(2,657)
10. Piutang Lainnya	56	60
11. PPAP Piutang lainnya -/-	(1)	(1)
12. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah	53,063	31,553
13. PPAP Pembiayaan -/-	(574)	(222)
14. Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	1,490	1,046
15. Biaya Dibayar Dimuka	6,073	7,362
16. Aktiva Tetap	5,869	5,578
17. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap -/-	(2,512)	(1,336)
18. Aktiva Lain-lain	267	48
JUMLAH AKTIVA	343,195	271,621
B. PASIVA		
1. Dana Simpanan Wadiah	32,647	26,534
2. Kewajiban Segera Lainnya	1,675	1,160
3. Kewajiban Kepada Bank Indonesia (FPJPS)		
4. Kewajiban Kepada Bank Lain	148	58
5. Surat Berharga Yang Diterbitkan	45,000	45,000
6. Kewajiban Lain-lain	86,350	60,731
7. Dana Investasi Tidak Terikat	177,797	137,515
a. Tabungan Mudharabah		
b. Deposito Mudharabah	177,797	137,515
b.1. Rupiah	177,797	137,515
b.2. Valuta Asing		
8. Saldo Laba (Rugi)	(422)	623
JUMLAH PASIVA	343,195	271,621

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
 PT BANK BUKOPIN
 JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770
 Telp. 7989837-7988266

Laba/Rugi
 Periode: Maret 2006 dan 2005

POS - POS	03-2006	03-2005
A. Pendapatan Operasional		
1. Margin Murabahah	8,587	7,007
2. Bagi Hasil Mudharabah	2,710	1,793
3. Bonus	28	69
4. Pendapatan Operasional Lainnya	539	519
B. Jumlah Pendapatan Operasional	11,864	9,388
C. Bagi Hasil untuk Investor Dana Investasi tdk terikat -/-		
1. Bank	1,519	992
2. Bukan Bank	4,590	3,176
3. Bank Indonesia		
D. Jumlah Distribusi Bagi Hasil	6,109	4,168
E. Pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil untuk investor dana investasi tidak terikat	5,755	5,220
F. Beban Operasional		
1. Bonus Wadiah	213	93
2. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	674	157
3. Beban Administrasi & Umum	1,068	967
4. Beban Personalia	1,830	1,427
5. Beban Lainnya	685	609
G. Jumlah Beban Operasional	4,470	3,253
H. Pendapatan (Beban) Operasional Bersih	1,285	1,967
I. Pendapatan Non Operasional	774	357
J. Beban Non Operasional	2,481	1,701
K. Laba (Rugi) Non Operasional Bersih	(1,707)	(1,344)
L. Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(422)	623

PERPUSTAKAAN
 UNNES

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
 PT BANK BUKOPIN
 JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770
 Telp. 7989837-7988266

Neraca
 Periode: Juni 2006 dan 2005

POS - POS	06-2006	06-2005
A. AKTIVA		
1. Kas	4,274	3,610
2. Giro Bank Indonesia	11,444	9,722
3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia		
4. Penempatan Pada Bank Lain	444	410
5. PPAP Penempatan Pada Bank Lain -/-	(7)	(4)
6. Surat Berharga Yang Dimiliki	29,500	20,000
7. PPAP Surat Berharga Yang Dimiliki -/-	(295)	(200)
8. Piutang Murabaha	229,613	189,346
9. PPAP Piutang Murabaha -/-	(3,007)	(2,725)
10. Piutang Lainnya	392	88
11. PPAP Piutang lainnya -/-	(4)	(1)
12. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah	51,518	42,729
13. PPAP Pembiayaan -/-	(534)	(321)
14. Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	1,553	1,086
15. Biaya Dibayar Dimuka	5,757	6,950
16. Aktiva Tetap	6,185	5,818
17. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap -/-	(2,815)	(1,623)
18. Aktiva Lain-lain	1,138	62
JUMLAH AKTIVA	335,156	274,947
B. PASIVA		
1. Dana Simpanan Wadiah	42,746	32,587
2. Kewajiban Segera Lainnya	1,371	799
3. Kewajiban Kepada Bank Indonesia (FPJPS)		
4. Kewajiban Kepada Bank Lain	56	58
5. Surat Berharga Yang Diterbitkan	45,000	48,000
6. Kewajiban Lain-lain	77,258	66,535
7. Dana Investasi Tidak Terikat	169,476	125,702
a. Tabungan Mudharabah		
b. Deposito Mudharabah	169,476	125,702
b.1. Rupiah	169,476	125,702
b.2. Valuta Asing		
8. Saldo Laba (Rugi)	(751)	1,266
JUMLAH PASIVA	335,156	274,947

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
 PT BANK BUKOPIN
 JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770
 Telp. 7989837-7988266

Laba/Rugi
 Periode: Juni 2006 dan 2005

	POS - POS	06-2006	06-2005
A.	Pendapatan Operasional		
	1. Margin Murabahah	17,227	13,691
	2. Bagi Hasil Mudharabah	6,097	3,937
	3. Bonus	114	129
	4. Pendapatan Operasional Lainnya	1,311	1,054
B.	Jumlah Pendapatan Operasional	24,749	18,811
C.	Bagi Hasil untuk Investor Dana Investasi tdk terikat -/-		
	1. Bank	3,011	1,894
	2. Bukan Bank	11,081	6,236
	3. Bank Indonesia		
D.	Jumlah Distribusi Bagi Hasil	14,092	8,130
E.	Pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil untuk investor dana investasi tidak terikat	10,657	10,681
F.	Beban Operasional		
	1. Bonus Wadiah	465	194
	2. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	1,344	298
	3. Beban Administrasi & Umum	2,327	1,998
	4. Beban Personalia	3,862	2,866
	5. Beban Lainnya	1,621	1,382
G.	Jumlah Beban Operasional	9,619	6,738
H.	Pendapatan (Beban) Operasional Bersih	1,038	3,943
I.	Pendapatan Non Operasional	12	35
J.	Beban Non Operasional	1,801	2,712
K.	Laba (Rugi) Non Operasional Bersih	(1,789)	(2,677)
L.	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(751)	1,266

PERPUSTAKAAN
 UNNES

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
 PT BANK BUKOPIN
 JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770
 Telp. 7989837-7988266

Neraca
 Periode: September 2006 dan 2005

POS - POS	09-2006	09-2005
A. AKTIVA		
1. Kas	4,704	2,917
2. Giro Bank Indonesia	11,571	12,422
3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia		
4. Penempatan Pada Bank Lain	192	351
5. PPAP Penempatan Pada Bank Lain -/-	(6)	(4)
6. Surat Berharga Yang Dimiliki	39,500	20,000
7. PPAP Surat Berharga Yang Dimiliki -/-	(395)	(200)
8. Piutang Murabaha	261,153	219,443
9. PPAP Piutang Murabaha -/-	(3,891)	(3,222)
10. Piutang Lainnya	665	84
11. PPAP Piutang lainnya -/-	(7)	(1)
12. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah	58,518	49,772
13. PPAP Pembiayaan -/-	(552)	(449)
14. Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	1,671	1,168
15. Biaya Dibayar Dimuka	5,693	6,535
16. Aktiva Tetap	6,267	5,824
17. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap -/-	(3,126)	(1,920)
18. Aktiva Lain-lain	6,668	120
JUMLAH AKTIVA	388,625	312,840
B. PASIVA		
1. Dana Simpanan Wadiah	46,899	30,946
2. Kewajiban Segera Lainnya	5,834	880
3. Kewajiban Kepada Bank Indonesia (FPJPS)		
4. Kewajiban Kepada Bank Lain	64	66
5. Surat Berharga Yang Diterbitkan	60,000	45,000
6. Kewajiban Lain-lain	80,374	61,353
7. Dana Investasi Tidak Terikat	197,333	172,855
a. Tabungan Mudharabah		
b. Deposito Mudharabah	197,333	172,855
b.1. Rupiah	197,333	172,855
b.2. Valuta Asing		
8. Saldo Laba (Rugi)	(1,879)	1,740
JUMLAH PASIVA	388,625	312,840

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
 PT BANK BUKOPIN
 JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770
 Telp. 7989837-7988266

Laba/Rugi
 Periode: September 2006 dan 2005

POS - POS	09-2006	09-2005
A. Pendapatan Operasional		
1. Margin Murabahah	27,566	21,407
2. Bagi Hasil Mudharabah	9,228	6,364
3. Bonus	114	136
4. Pendapatan Operasional Lainnya	2,113	1,653
B. Jumlah Pendapatan Operasional	39,021	29,560
C. Bagi Hasil untuk Investor Dana Investasi tdk terikat -/-		
1. Bank	4,877	2,851
2. Bukan Bank	14,734	9,978
3. Bank Indonesia		
D. Jumlah Distribusi Bagi Hasil	19,611	12,829
E. Pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil untuk investor dana investasi tidak terikat	19,410	16,731
F. Beban Operasional		
1. Bonus Wadiah	663	302
2. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	3,228	924
3. Beban Administrasi & Umum	3,443	3,042
4. Beban Personalia	5,814	4,472
5. Beban Lainnya	2,803	2,128
G. Jumlah Beban Operasional	15,951	10,868
H. Pendapatan (Beban) Operasional Bersih	3,459	5,863
I. Pendapatan Non Operasional	14	57
J. Beban Non Operasional	5,352	4,180
K. Laba (Rugi) Non Operasional Bersih	(5,338)	(4,123)
L. Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(1,879)	1,740

PERPUSTAKAAN
 UNNES

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BANK BUKOPIN
JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770
Telp. 7989837-7988266

Neraca
Periode: Desember 2006 dan 2005

POS - POS	12-2006	12-2005
A. AKTIVA		
1. Kas	4,470	2,596
2. Giro Bank Indonesia	14,361	9,984
3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	73,000	20,900
4. Penempatan Pada Bank Lain	766	339
5. PPAP Penempatan Pada Bank Lain -/-	(10)	(4)
6. Surat Berharga Yang Dimiliki	39,500	21,000
7. PPAP Surat Berharga Yang Dimiliki -/-	(395)	(210)
8. Piutang Murabaha	300,013	252,698
9. PPAP Piutang Murabaha -/-	(3,867)	(3,462)
10. Piutang Lainnya	710	42
11. PPAP Piutang lainnya -/-	(7)	(1)
12. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah	62,278	51,744
13. PPAP Pembiayaan -/-	(561)	(559)
14. Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	1,908	1,464
15. Biaya Dibayar Dimuka	13,569	6,264
16. Aktiva Tetap	8,459	5,839
17. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap -/-	(3,765)	(2,216)
18. Aktiva Lain-lain	2,235	52
JUMLAH AKTIVA	512,664	366,470
B. PASIVA		
1. Dana Simpanan Wadiah	151,581	51,912
2. Kewajiban Segera Lainnya	5,568	1,645
3. Kewajiban Kepada Bank Indonesia (FPJPS)		
4. Kewajiban Kepada Bank Lain	188	71
5. Surat Berharga Yang Diterbitkan	45,000	45,000
6. Kewajiban Lain-lain	72,044	88,172
7. Dana Investasi Tidak Terikat	240,525	177,442
a. Tabungan Mudharabah		
b. Deposito Mudharabah	240,525	177,442
b.1. Rupiah	240,525	177,442
b.2. Valuta Asing		
8. Saldo Laba (Rugi)	(2,242)	2,228
JUMLAH PASIVA	512,664	366,470

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
 PT BANK BUKOPIN
 JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770
 Telp. 7989837-7988266

Laba/Rugi
 Periode: Desember 2006 dan 2005

	POS - POS	12-2006	12-2005
A.	Pendapatan Operasional		
	1. Margin Murabahah	39,836	30,375
	2. Bagi Hasil Mudharabah	12,821	9,044
	3. Bonus	209	144
	4. Pendapatan Operasional Lainnya	3,179	2,340
B.	Jumlah Pendapatan Operasional	56,045	41,903
C.	Bagi Hasil untuk Investor Dana Investasi tdk terikat -/-		
	1. Bank	7,105	4,248
	2. Bukan Bank	20,730	14,736
	3. Bank Indonesia		
D.	Jumlah Distribusi Bagi Hasil	27,835	18,984
E.	Pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil untuk investor dana investasi tidak terikat	28,210	22,919
F.	Beban Operasional		
	1. Bonus Wadiah	1,035	412
	2. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	3,713	1,289
	3. Beban Administrasi & Umum	6,151	4,185
	4. Beban Personalia	8,103	6,256
	5. Beban Lainnya	4,550	2,965
G.	Jumlah Beban Operasional	23,552	15,107
H.	Pendapatan (Beban) Operasional Bersih	4,658	7,812
I.	Pendapatan Non Operasional	253	73
J.	Beban Non Operasional	7,153	5,657
K.	Laba (Rugi) Non Operasional Bersih	(6,900)	(5,584)
L.	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(2,242)	2,228

PERPUSTAKAAN
 UNNES

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
 PT BANK BUKOPIN
 JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770
 Telp. 7989837-7988266

Neraca
 Periode: Maret 2007 dan 2006

- POS	03-2007	03-2006
A. AKTIVA		
1. Kas	4,805	3,851
2. Giro Bank Indonesia	19,323	10,092
3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	49,200	11,300
4. Penempatan Pada Bank Lain	394	201
5. PPAP Penempatan Pada Bank Lain -/-	(16)	(6)
6. Surat Berharga Yang Dimiliki	20,000	39,200
7. PPAP Surat Berharga Yang Dimiliki -/-	(200)	(392)
8. Piutang Murabaha	264,146	219,154
9. PPAP Piutang Murabaha -/-	(4,332)	(3,936)
10. Piutang Lainnya	690	56
11. PPAP Piutang lainnya -/-	(8)	(1)
12. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah	62,361	53,063
13. PPAP Pembiayaan -/-	(560)	(574)
14. Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	1,980	1,490
15. Biaya Dibayar Dimuka	13,254	6,073
16. Aktiva Tetap	8,437	5,869
17. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap -/-	(4,117)	(2,512)
18. Aktiva Lain-lain	2,002	267
JUMLAH AKTIVA	437,359	343,195
B. PASIVA		
1. Dana Simpanan Wadiah	62,398	32,647
2. Kewajiban Segera Lainnya	978	1,675
3. Kewajiban Kepada Bank Indonesia (FPJPS)		
4. Kewajiban Kepada Bank Lain	871	148
5. Surat Berharga Yang Diterbitkan	45,000	45,000
6. Kewajiban Lain-lain	82,058	86,350
7. Dana Investasi Tidak Terikat	244,210	177,797
a. Tabungan Mudharabah		
b. Deposito Mudharabah	244,210	177,797
b.1. Rupiah	244,210	177,797
b.2. Valuta Asing		
8. Saldo Laba (Rugi)	1,844	(422)
JUMLAH PASIVA	437,359	343,195

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BANK BUKOPIN
JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770
Telp. 7989837-7988266

Neraca
Periode: Juni 2007 dan 2006

POS - POS	06-2007	06-2006
A. AKTIVA		
1. Kas	6,285	4,274
2. Giro Bank Indonesia	14,437	11,444
3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	3,200	
4. Penempatan Pada Bank Lain	485	444
5. PPAP Penempatan Pada Bank Lain -/-	(7)	(7)
6. Surat Berharga Yang Dimiliki	23,000	29,500
7. PPAP Surat Berharga Yang Dimiliki -/-	(230)	(295)
8. Piutang Murabaha	293,689	229,613
9. PPAP Piutang Murabaha -/-	(4,775)	(3,007)
10. Piutang Lainnya	64	392
11. PPAP Piutang lainnya -/-	(1)	(4)
12. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah	79,804	51,518
13. PPAP Pembiayaan -/-	(819)	(534)
14. Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	1,719	1,553
15. Biaya Dibayar Dimuka	12,954	5,757
16. Aktiva Tetap	8,583	6,185
17. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap -/-	(4,528)	(2,815)
18. Aktiva Lain-lain	1,902	1,138
JUMLAH AKTIVA	435,762	335,156
B. PASIVA		
1. Dana Simpanan Wadiah	74,116	42,746
2. Kewajiban Segera Lainnya	1,162	1,371
3. Kewajiban Kepada Bank Indonesia (FPJPS)		
4. Kewajiban Kepada Bank Lain	205	56
5. Surat Berharga Yang Diterbitkan	45,000	45,000
6. Kewajiban Lain-lain	93,874	77,258
7. Dana Investasi Tidak Terikat	219,470	169,476
a. Tabungan Mudharabah		
b. Deposito Mudharabah	219,470	169,476
b.1. Rupiah	219,470	169,476
b.2. Valuta Asing		
8. Saldo Laba (Rugi)	1,935	(751)
JUMLAH PASIVA	435,762	335,156

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
 PT BANK BUKOPIN
 JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770
 Telp. 7989837-7988266

Laba/Rugi
 Periode: Juni 2007 dan 2006

POS - POS	06-2007	06-2006
A. Pendapatan Operasional		
1. Margin Murabahah	22,284	17,227
2. Bagi Hasil Mudharabah	6,903	6,097
3. Bonus	1,636	114
4. Pendapatan Operasional Lainnya	2,326	1,311
B. Jumlah Pendapatan Operasional	33,149	24,749
C. Bagi Hasil untuk Investor Dana Investasi tdk terikat -/-		
1. Bank	4,262	3,011
2. Bukan Bank	10,049	11,081
3. Bank Indonesia		
D. Jumlah Distribusi Bagi Hasil	14,311	14,092
E. Pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil untuk investor dana investasi tidak terikat	18,838	10,657
F. Beban Operasional		
1. Bonus Wadiah	1,093	465
2. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	2,174	1,344
3. Beban Administrasi & Umum	3,052	2,327
4. Beban Personalia	5,053	3,862
5. Beban Lainnya	2,368	1,621
G. Jumlah Beban Operasional	13,740	9,619
H. Pendapatan (Beban) Operasional Bersih	5,098	1,038
I. Pendapatan Non Operasional	398	12
J. Beban Non Operasional	3,561	1,801
K. Laba (Rugi) Non Operasional Bersih	(3,163)	(1,789)
L. Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1,935	(751)

PERPUSTAKAAN
 UNNES

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BANK BUKOPIN
JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770
Telp. 7989837-7988266

Neraca
Periode: September 2007 dan 2006

POS - POS	09-2007	09-2006
A. AKTIVA		
1. Kas	6,591	4,704
2. Giro Bank Indonesia	17,874	11,571
3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	2,000	
4. Penempatan Pada Bank Lain	115	192
5. PPAP Penempatan Pada Bank Lain -/-	(6)	(6)
6. Surat Berharga Yang Dimiliki	30,000	39,500
7. PPAP Surat Berharga Yang Dimilki -/-	(300)	(395)
8. Piutang Murabaha	325,301	261,153
9. PPAP Piutang Murabaha -/-	(4,379)	(3,891)
10. Piutang Lainnya	12	665
11. PPAP Piutang lainnya -/-	(1)	(7)
12. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah	87,162	58,518
13. PPAP Pembiayaan -/-	(815)	(552)
14. Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	1,754	1,671
15. Biaya Dibayar Dimuka	12,704	5,693
16. Aktiva Tetap	8,673	6,267
17. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap -/-	(4,918)	(3,126)
18. Aktiva Lain-lain	2,045	6,668
JUMLAH AKTIVA	483,812	388,625
B. PASIVA		
1. Dana Simpanan Wadiah	77,976	46,899
2. Kewajiban Segera Lainnya	2,993	5,834
3. Kewajiban Kepada Bank Indonesia (FPJPS)		
4. Kewajiban Kepada Bank Lain	317	64
5. Surat Berharga Yang Diterbitkan	51,000	60,000
6. Kewajiban Lain-lain	111,645	80,374
7. Dana Investasi Tidak Terikat	234,632	197,333
a. Tabungan Mudharabah		
b. Deposito Mudharabah	234,632	197,333
b.1. Rupiah	234,632	197,333
b.2. Valuta Asing		
8. Saldo Laba (Rugi)	5,249	(1,879)
JUMLAH PASIVA	483,812	388,625

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
 PT BANK BUKOPIN
 JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770
 Telp. 7989837-7988266

Laba/Rugi
 Periode: September 2007 dan 2006

POS - POS	09-2007	09-2006
A. Pendapatan Operasional		
1. Margin Murabahah	33,820	27,566
2. Bagi Hasil Mudharabah	10,974	9,228
3. Bonus	1,741	114
4. Pendapatan Operasional Lainnya	3,672	2,113
B. Jumlah Pendapatan Operasional	50,207	39,021
C. Bagi Hasil untuk Investor Dana Investasi tdk terikat -/-		
1. Bank	6,185	4,877
2. Bukan Bank	14,413	14,734
3. Bank Indonesia		
D. Jumlah Distribusi Bagi Hasil	20,598	19,611
E. Pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil untuk investor dana investasi tidak terikat	29,609	19,410
F. Beban Operasional		
1. Bonus Wadiah	1,642	663
2. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	1,757	3,228
3. Beban Administrasi & Umum	4,461	3,443
4. Beban Personalia	7,670	5,814
5. Beban Lainnya	3,701	2,803
G. Jumlah Beban Operasional	19,231	15,951
H. Pendapatan (Beban) Operasional Bersih	10,378	3,459
I. Pendapatan Non Operasional	129	14
J. Beban Non Operasional	5,258	5,352
K. Laba (Rugi) Non Operasional Bersih	(5,129)	(5,338)
L. Laba (Rugi) Tahun Berjalan	5,249	(1,879)

PERPUSTAKAAN
 UNNES

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
PT BANK BUKOPIN
JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770
Telp. 7989837-7988266

Neraca
Periode: Desember 2007 dan 2006

POS - POS	12-2007	12-2006
A. AKTIVA		
1. Kas	9,000	4,470
2. Giro Bank Indonesia	19,462	14,361
3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	119,000	73,000
4. Penempatan Pada Bank Lain	39	766
5. PPAP Penempatan Pada Bank Lain -/-	(6)	(10)
6. Surat Berharga Yang Dimiliki	20,000	39,500
7. PPAP Surat Berharga Yang Dimiliki -/-	(200)	(395)
8. Piutang Murabaha	368,393	300,013
9. PPAP Piutang Murabaha -/-	(4,389)	(3,867)
10. Piutang Lainnya	14	710
11. PPAP Piutang lainnya -/-	(1)	(7)
12. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah	89,938	62,278
13. PPAP Pembiayaan -/-	(715)	(561)
14. Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	2,105	1,908
15. Biaya Dibayar Dimuka	12,209	13,569
16. Aktiva Tetap	8,709	8,459
17. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap -/-	(5,265)	(3,765)
18. Aktiva Lain-lain	2,103	2,235
JUMLAH AKTIVA	640,396	512,664
B. PASIVA		
1. Dana Simpanan Wadiah	154,717	151,581
2. Kewajiban Segera Lainnya	1,961	5,568
3. Kewajiban Kepada Bank Indonesia (FPJPS)		
4. Kewajiban Kepada Bank Lain	215	188
5. Surat Berharga Yang Diterbitkan	45,000	45,000
6. Kewajiban Lain-lain	156,395	72,044
7. Dana Investasi Tidak Terikat	274,026	240,525
a. Tabungan Mudharabah		
b. Deposito Mudharabah	274,026	240,525
b.1. Rupiah	274,026	240,525
b.2. Valuta Asing		
8. Saldo Laba (Rugi)	8,082	(2,242)
JUMLAH PASIVA	640,396	512,664

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
 PT BANK BUKOPIN
 JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770
 Telp. 7989837-7988266

Laba/Rugi
 Periode: Desember 2007 dan 2006

POS - POS	12-2007	12-2006
A. Pendapatan Operasional		
1. Margin Murabahah	46,742	39,836
2. Bagi Hasil Mudharabah	15,206	12,821
3. Bonus	2,035	209
4. Pendapatan Operasional Lainnya	4,888	3,179
B. Jumlah Pendapatan Operasional	68,871	56,045
C. Bagi Hasil untuk Investor Dana Investasi tdk terikat -/-		
1. Bank	8,177	7,105
2. Bukan Bank	18,820	20,730
3. Bank Indonesia		
D. Jumlah Distribusi Bagi Hasil	26,997	27,835
E. Pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil untuk investor dana investasi tidak terikat	41,874	28,210
F. Beban Operasional		
1. Bonus Wadiah	2,151	1,035
2. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	2,694	3,713
3. Beban Administrasi & Umum	5,913	6,151
4. Beban Personalia	10,549	8,103
5. Beban Lainnya	5,198	4,550
G. Jumlah Beban Operasional	26,505	23,552
H. Pendapatan (Beban) Operasional Bersih	15,369	4,658
I. Pendapatan Non Operasional	209	253
J. Beban Non Operasional	7,496	7,153
K. Laba (Rugi) Non Operasional Bersih	(7,287)	(6,900)
L. Laba (Rugi) Tahun Berjalan	8,082	(2,242)

PERPUSTAKAAN
 UNNES

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
 PT BANK BUKOPIN
 JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770
 Telp. 7989837-7988266

Neraca
 Periode: Maret 2008 dan 2007

POS - POS	03-2008	03-2007
A. AKTIVA		
1. Kas	10,097	4,805
2. Giro Bank Indonesia	17,616	19,323
3. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	37,000	49,200
4. Penempatan Pada Bank Lain	107	394
5. PPAP Penempatan Pada Bank Lain -/-	(6)	(16)
6. Surat Berharga Yang Dimiliki	25,000	20,000
7. PPAP Surat Berharga Yang Dimiliki -/-	(250)	(200)
8. Piutang Murabaha	367,282	264,146
9. PPAP Piutang Murabaha -/-	(5,101)	(4,332)
10. Piutang Lainnya	722	690
11. PPAP Piutang lainnya -/-	(7)	(8)
12. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah	91,570	62,361
13. PPAP Pembiayaan -/-	(758)	(560)
14. Pendapatan Yang Masih Akan Diterima	1,973	1,980
15. Biaya Dibayar Dimuka	12,463	13,254
16. Aktiva Tetap	8,791	8,437
17. Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap -/-	(5,620)	(4,117)
18. Aktiva Lain-lain	2,495	2,002
JUMLAH AKTIVA	563,374	437,359
B. PASIVA		
1. Dana Simpanan Wadiah	101,818	62,398
2. Kewajiban Segera Lainnya	920	978
3. Kewajiban Kepada Bank Indonesia (FPJPS)		
4. Kewajiban Kepada Bank Lain	91	871
5. Surat Berharga Yang Diterbitkan	45,000	45,000
6. Kewajiban Lain-lain	171,942	82,058
7. Dana Investasi Tidak Terikat	241,030	244,210
a. Tabungan Mudharabah		
b. Deposito Mudharabah	241,030	244,210
b.1. Rupiah	241,030	244,210
b.2. Valuta Asing		
8. Saldo Laba (Rugi)	2,573	1,844
JUMLAH PASIVA	563,374	437,359

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
 PT BANK BUKOPIN
 JL MT.HARYONO KAV 50-51 JAKARTA 12770
 Telp. 7989837-7988266

Laba/Rugi
 Periode: Maret 2008 dan 2007

POS - POS	03-2008	03-2007
A. Pendapatan Operasional		
1. Margin Murabahah	11,979	11,561
2. Bagi Hasil Mudharabah	3,954	3,391
3. Bonus	1,546	1,069
4. Pendapatan Operasional Lainnya	1,429	1,027
B. Jumlah Pendapatan Operasional	18,908	17,048
C. Bagi Hasil untuk Investor Dana Investasi tdk terikat -/-		
1. Bank	1,838	2,295
2. Bukan Bank	4,493	5,198
3. Bank Indonesia		
D. Jumlah Distribusi Bagi Hasil	6,331	7,493
E. Pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil untuk investor dana investasi tidak terikat	12,577	9,555
F. Beban Operasional		
1. Bonus Wadiah	691	603
2. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	649	655
3. Beban Administrasi & Umum	1,573	1,512
4. Beban Personalia	2,922	2,484
5. Beban Lainnya	1,519	1,019
G. Jumlah Beban Operasional	7,354	6,273
H. Pendapatan (Beban) Operasional Bersih	5,223	3,282
I. Pendapatan Non Operasional	3	263
J. Beban Non Operasional	2,653	1,701
K. Laba (Rugi) Non Operasional Bersih	(2,650)	(1,438)
L. Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2,573	1,844

PERPUSTAKAAN
 UNNES

Lampiran 3. Data Total Aktiva (dalam jutaan rupiah)

No	Total Aktiva	
	Sebelum <i>Office Channeling</i>	Setelah <i>Office Channeling</i>
1	366.470	437.359
2	343.195	435.762
3	335.156	483.812
4	388.625	640.396
5	512.664	563.374
6	327.355	575.918
7	329.827	604.064
8	456.481	644.944
9	485.782	832.519
10	532.124	984.609
11	62.135	123.024
12	63.374	144.134
13	76.121	170.919
14	98.306	234.588
15	102.593	431.340
16	82.391	200.220
17	90.102	218.111
18	117.183	228.379
19	127.983	294.328
20	192.007	394.021
21	327.555	492.564
22	386.186	492.714
23	369.539	503.762
24	385.511	556.589
25	489.629	535.562
26	663.920	1.143.210
27	729.808	1.141.678
28	845.359	1.151.734
29	1.003.847	1.191.354
30	1.138.623	1.150.366
Σ	11.429.851	17.001.354
Mean	380.995	566.711
Median	354.832	498.238

Sumber: Data yang telah diolah

Lampiran 4. Data Antar Bank Pasiva (dalam jutaan rupiah)

No	Antar Bank Pasiva	
	Sebelum <i>Office Channeling</i>	Setelah <i>Office Channeling</i>
1	28.764	871
2	148	205
3	56	317
4	64	215
5	188	91
6	10.320	1.077
7	15.625	650
8	18	3.084
9	357	2.992
10	406	92.700
11	0	900
12	0	1.200
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	0	0
20	0	0
21	64	40.514
22	78	31.014
23	7.078	29.414
24	2.079	32.900
25	2.000	30.500
26	0	11
27	0	304.113
28	600	4.398
29	884	2.802
30	46.543	1.393
Σ	115.272	581.361
Mean	3.842	19.379
Median	64	885

Sumber: Data yang telah diolah

Lampiran 5. Data Total Kewajiban (dalam jutaan rupiah)

No	Total Kewajiban	
	Sebelum <i>Office Channeling</i>	Setelah <i>Office Channeling</i>
1	364.242	435.515
2	343.617	433.827
3	335.907	478.563
4	390.504	632.314
5	514.906	560.801
6	333.180	571.601
7	327.149	594.939
8	451.855	629.518
9	476.202	815.750
10	526.107	965.775
11	59.922	115.680
12	59.669	140.993
13	73.345	166.671
14	93.912	230.153
15	96.854	426.320
16	82.356	198.824
17	89.622	216.180
18	115.667	225.468
19	125.249	290.956
20	189.653	390.686
21	316.566	487.154
22	369.160	483.647
23	358.295	488.351
24	369.854	535.317
25	467.940	561.613
26	661.959	1.138.953
27	729.345	1.134.630
28	844.148	1.138.864
29	994.050	1.171.755
30	1.121.303	1.147.819
Σ	11.282.538	16.808.637
Mean	376.085	560.288
Median	350.956	487.752

Sumber: Data yang telah diolah

Lampiran 6. Data Pendapatan Operasional (dalam jutaan rupiah)

No	Pendapatan Operasional	
	Sebelum Office Channeling	Setelah Office Channeling
1	22.919	9.555
2	5.755	18.838
3	10.657	29.609
4	19.410	41.874
5	28.210	12.577
6	17.022	15.955
7	8.662	32.513
8	20.017	52.946
9	35.830	48.977
10	50.570	63.644
11	5.014	3.844
12	2.083	8.286
13	4.480	13.266
14	7.579	14.433
15	11.010	17.306
16	2.492	3.364
17	1.549	7.285
18	3.969	11.716
19	7.374	17.178
20	10.733	18.588
21	35.034	11.935
22	10.238	24.304
23	22.368	38.523
24	34.671	53.225
25	47.669	43.875
26	55.599	32.845
27	20.195	67.214
28	45.045	105.945
29	74.972	158.572
30	122.857	41.629
Σ	743.983	1.019.821
Mean	24.799	33.994
Median	18.216	21.571

Sumber: Data yang telah diolah

Lampiran 7. Data Beban Operasional (dalam jutaan rupiah)

No	Beban Operasional	
	Sebelum <i>Office</i> <i>Channeling</i>	Setelah <i>Office</i> <i>Channeling</i>
1	15.107	6.273
2	4.470	13.740
3	9.619	19.231
4	15.951	26.505
5	23.552	7.354
6	17.221	11.604
7	5.569	23.427
8	14.885	37.425
9	24.037	31.723
10	35.497	44.710
11	2.846	2.484
12	588	5.145
13	1.704	9.021
14	3.185	10.018
15	5.269	12.354
16	273	1.966
17	1.104	5.347
18	2.487	8.796
19	4.638	13.797
20	8.376	15.073
21	23.872	6.592
22	4.129	15.735
23	10.952	23.446
24	18.837	32.260
25	25.694	25.193
26	53.936	31.986
27	19.791	64.649
28	43.981	93.333
29	65.485	139.303
30	105.952	39.248
Σ	569.007	777.738
Mean	18.967	25.925
Median	12.918	15.404

Sumber: Data yang telah diolah

Lampiran 8. Data Total Laba (dalam jutaan rupiah)

No	Laba	
	Sebelum <i>Office Channeling</i>	Setelah <i>Office Channeling</i>
1	2.228	1.844
2	-422	1.935
3	-751	5.249
4	-1.879	8.082
5	-2.242	2.573
6	-4.594	4.317
7	-1.063	9.125
8	-2.137	15.426
9	9.580	16.769
10	11.842	18.834
11	2.213	1.360
12	1.492	3.141
13	2.776	4.248
14	4.394	4.435
15	5.739	5.020
16	30	1.396
17	445	1.931
18	1.481	2.911
19	2.734	3.372
20	2.354	3.335
21	10.989	5.410
22	6.037	9.067
23	11.244	15.411
24	15.657	21.272
25	21.689	18.949
26	1.961	959
27	463	2.725
28	1.211	12.870
29	9.797	19.599
30	17.320	2.547
Σ	130.588	224.112
Mean	4.353	7.470
Median	2.220	4.376

Sumber: Data yang telah diolah

Lampiran 9. Hasil Perhitungan NPM (dalam persen)

No	NPM	
	Sebelum <i>Office Channeling</i>	Setelah <i>Office Channeling</i>
1	9,72	19,30
2	-7,33	10,27
3	-7,05	17,73
4	-9,68	19,30
5	-7,95	20,46
6	-26,99	27,06
7	-12,27	28,07
8	-10,68	29,13
9	26,74	34,24
10	23,42	29,59
11	44,14	35,38
12	71,63	37,91
13	61,96	32,02
14	57,98	30,73
15	52,12	29,01
16	1,20	41,50
17	28,73	26,51
18	37,31	24,85
19	37,08	19,63
20	21,93	17,94
21	31,37	45,33
22	58,97	37,31
23	50,27	40,00
24	45,16	39,97
25	45,50	43,19
26	3,53	2,92
27	2,29	4,05
28	2,69	12,15
29	13,07	12,36
30	14,10	6,12
Σ	658,96	774,04
Mean	21,96	25,80
Median	22,67	27,56

Sumber: Data yang telah diolah

Lampiran 10. Hasil Perhitungan ROA (dalam persen)

No	ROA	
	Sebelum <i>Office Channeling</i>	Setelah <i>Office Channeling</i>
1	0,61	0,42
2	-0,12	0,44
3	-0,22	1,08
4	-0,48	1,26
5	-0,44	0,46
6	-1,40	0,75
7	-0,32	1,51
8	-0,47	2,39
9	1,97	2,01
10	2,22	1,91
11	3,56	1,10
12	2,35	2,18
13	3,65	2,48
14	4,47	1,89
15	5,59	1,16
16	0,04	0,70
17	0,49	0,88
18	1,26	1,27
19	2,14	1,15
20	1,23	0,85
21	3,35	1,10
22	1,56	1,84
23	3,04	3,06
24	4,06	3,82
25	4,43	3,54
26	0,29	0,08
27	0,06	0,24
28	0,14	1,12
29	0,98	1,64
30	1,52	0,22
Σ	45,56	42,55
Mean	1,52	1,42
Median	1,24	1,15

Sumber: Data yang telah diolah

Lampiran 11. Hasil Perhitungan REO (dalam persen)

No	REO	
	Sebelum <i>Office Channeling</i>	Setelah <i>Office Channeling</i>
1	65,91	65,65
2	77,67	72,94
3	90,26	64,95
4	82,18	63,30
5	83,49	58,47
6	101,17	72,73
7	64,29	72,05
8	74,36	70,68
9	67,09	64,77
10	70,19	70,25
11	56,76	64,62
12	28,23	62,09
13	38,04	68,00
14	42,02	69,41
15	47,86	71,39
16	10,95	58,44
17	71,27	73,40
18	62,66	75,08
19	62,90	80,32
20	78,04	81,10
21	68,14	55,23
22	40,33	64,74
23	48,96	60,86
24	54,33	60,61
25	53,90	57,42
26	97,10	97,38
27	98,00	96,18
28	97,64	88,10
29	87,35	87,85
30	86,24	94,28
Σ	2.007,23	2.142,28
Mean	66,91	71,41
Median	67,61	69,83

Sumber: Data yang telah diolah

Lampiran 12. Hasil Perhitungan RABP (dalam persen)

No	RABP	
	Sebelum <i>Office Channeling</i>	Setelah <i>Office Channeling</i>
1	7,90	0,20
2	0,04	0,05
3	0,02	0,07
4	0,02	0,03
5	0,04	0,02
6	3,10	0,19
7	4,78	0,11
8	0,00	0,49
9	0,07	0,37
10	0,08	9,60
11	0	0,78
12	0	0,85
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	0	0
20	0	0
21	0,02	8,32
22	0,02	6,41
23	1,97	6,02
24	0,56	6,15
25	0,43	5,43
26	0	0,00
27	0	26,80
28	0,07	0,39
29	0,09	0,24
30	4,15	0,12
Σ	23,36	72,63
Mean	0,78	2,42
Median	0,02	0,15

Sumber: Data yang telah diolah

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
NPM sebelum <i>Office Channeling</i>	.122	30	.200 [†]	.961	30	.321
NPM setelah <i>Office Channeling</i>	.090	30	.200 [†]	.965	30	.406

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
ROA sebelum <i>Office Channeling</i>	.125	30	.200 [†]	.945	30	.124
ROA setelah <i>Office Channeling</i>	.162	30	.044	.932	30	.054

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
REO sebelum <i>Office Channeling</i>	.090	30	.200 [†]	.972	30	.604
REO setelah <i>Office Channeling</i>	.166	30	.035	.909	30	.014

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
RABP sebelum <i>Office Channeling</i>	.412	30	.000	.498	30	.000
RABP setelah <i>Office Channeling</i>	.381	30	.000	.505	30	.000

Lampiran 12. Uji Hipotesis

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 - NPM_sebelum_Office_Channeling NPM_setelah_Office_Channeling	3.83600	22.66640	4.13830	12.29977	4.62777	.927	29	.362

Test Statistics^b

	REO_sebelum_Office_Channeling - REO_setelah_Office_Channeling	
Z		-1.347 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)		.178

a. Based on positive ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 - ROA_sebelum_Office_Channeling ROA_setelah_Office_Channeling	.10033	1.51339	.27631	.46478	.66544	.363	29	.719

Test Statistics^b

	RABP_sebelum_Office_Channeling - RABP_setelah_Office_Channeling
Z	-1.999 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	.046

a. Based on positive ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

